

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

WINNE CAHYA SEMBODO

NIM 2105046060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Winne Cahya Sembodo
NIM : 2105046060
Judul : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2019-2023

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 25 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 30 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Tri Widyastuti Ningsih, M. Ak
NIP. 198710102019032017

Sekretaris Sidang

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

Penguji I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003



Penguji II

Dr. Suhirman, MA. Ek
NIP. 198412122019031010

Pembimbing I

Warno, SE., M. Si
NIP. 198307212015031002

Pembimbing II

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara Winne Cahya Sembodo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Winne Cahya Sembodo

NIM : 2105046060

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Mei 2025

Pembimbing I



Warno, S.E., M.Si.

NIP. 198307212015031002

Pembimbing II



Mashilal, M.Si

NIP. 198405162019031005

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Hindia)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winne Cahya Sembodo

NIM : 2105046060

Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan pada penelitian sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat menggunakan karya orang lain, kecuali terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Mei 2025



Winne Cahya Sembodo

NIM. 2105046060

ABSTRAK

Dalam beberapa dekade terakhir upaya penghindaran pajak oleh perusahaan terus terjadi dan semakin terstruktur. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang mengurangi nominal pajak yang seharusnya dibayarkan, fenomena ini didorong oleh lemahnya pengawasan dan regulasi perpajakan yang ada di suatu negara. Penghindaran pajak menjadi isu krusial di Indonesia, mengingat pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dalam mendanai pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan deskriptif asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan *purposive sampling* dengan total sampel yang digunakan sebanyak 15 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga diperoleh 75 sampel. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif

ABSTRACT

In recent decades, tax avoidance by companies has continued to occur and become increasingly structured. Tax avoidance is an activity that reduces the nominal amount of tax that should be paid, a phenomenon driven by weak supervision and taxation regulations in a country. Tax avoidance has become a critical issue in Indonesia, given that taxes are one of the main sources of revenue for the state in funding development. This study aims to determine whether there is an influence of corporate governance on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. This study uses a quantitative associative approach. The sampling technique employed is purposive sampling, with a total of 15 companies over a five-year period, resulting in 75 samples. The analysis used is panel data analysis utilizing Eviews 9 software. The results of the analysis indicate that the institutional ownership variable has a positive but insignificant effect on tax avoidance, the independent board of commissioners variable has a positive but insignificant effect on tax avoidance, the audit committee variable has a negative but insignificant effect on tax avoidance, and the executive compensation variable has a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, executive compensation.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga seluruh pengikutnya diakhir zaman.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023” ini disusun sebagai proses akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga masukkan serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca serta ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashilal, M.Si., selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku Wali Dosen yang telah menyetujui pengajuan judul penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas semua ilmu yang disampaikan.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membantu administrasi selama proses perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Ibu Hasnidah dan Bapak Sodik yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya dan selalu mendukung segala keputusan yang anaknya ambil.
9. Upay tercinta, Indyana Rachma Cania, S.Pd., yang sudah banyak berperan selama ini, tidak hanya sebagai seorang kakak tetapi juga sebagai teman, sahabat bahkan orang tua
10. Untuk orang-orang yang selalu bersama penulis baik dikos, kelas, kampus dan disegala situasi baik susah maupun senang Dwi Shinta Meitiyana, Anggi Fitria Al-Magfirah, Indah Surya Mustika, Reyza Rindi Antika, Zuli Rahmawati. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian semua.

Untuk semua orang yang pernah hadir dan terlibat dalam proses panjang ini penulis ucapkan terimakasih. Semoga semua doa baik yang dipanjatkan dapat diijabah oleh Allah SWT. Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu kritik serta saran yang membangun diharapkan untuk kebaikan kedepannya. Penulis harap skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembacanya.

PERSEMBAHAN

Untuk Ibuk Hasnidah dan Bapak Sodik, dalam skripsi ini adek persembahkan beberapa kata sebagai ungkapan terimakasih. Mungkin tidak semua bisa terucap dengan sempurna, tapi semoga tulisan ini bisa mewakili rasa syukur dan cinta untuk kalian. Ibuk bapak, terimakasih karena selalu memberikan yang terbaik untuk anak kalian. Terimakasih sudah menjadi sosok yang paling adek kagumi selama ini. Terimakasih untuk semua susah payah yang ibuk rasakan, untuk segala letih lelah yang ibuk pendam sendirian. Untuk bapak yang rela mengorbankan lelap malamnya demi mencari nafkah untuk memastikan adek bisa sampai dititik ini. Untuk saudara kandung penulis, Indyana Rachma Cania, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses hidup penulis selama ini *i hope you are my sister in every universe*.

Dan untuk keluargaku ya Allah mereka melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk membuatku bahagia maka berikanlah kebahagiaan sepuluh kali, seribu kali bahkan tak terhingga melebihi kebahagiaan yang mereka berikan untukku.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Penghindaran Pajak	12
2.1.3 Tata Kelola Perusahaan	16
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Hipotesis Penelitian	33
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	33
2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	34
2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	35
2.3.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	36
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	39

3.2 Populasi dan Sampel	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	40
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Hasil Penelitian	59
4.2.1 Statistik Deskriptif	59
4.2.2 Model Estimasi Data Panel	61
4.2.3 Penentuan Regresi Data Panel	63
4.2.3.1 Hasil Uji Chow	63
4.2.3.2 Hasil Uji Hausman	64
4.2.3.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier	65
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas	66
4.2.4.2 Uji Multikolinearitas	67
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas	68
4.2.5 Uji Koefisien Determinan (R^2)	68
4.2.6 Uji Regresi Data Panel	69
4.2.7 Uji Hipotesis	71
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUPAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023 (dalam triliun rupiah).....	2
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel	50
Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur	51
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.4 Common Effect Model	61
Tabel 4.5 Fixed Effect Model	62
Tabel 4.6 Random Effect Model.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Data Panel REM.....	69
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	71
Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Penelitian.....	89
Lampiran 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	101
Lampiran 3 Hasil Uji Common Effect Model (CEM)	102
Lampiran 4 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)	102
Lampiran 5 Hasil Uji Random Effect Model (REM).....	103
Lampiran 6 Hasil Uji Chow	104
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman	105
Lampiran 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier	106
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas.....	107
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas	107
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak mengambil peran penting dalam penerimaan negara karena digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan negara serta mengoperasikan program pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan sarana umum seperti jembatan, sekolah, rumah sakit dan layanan sosial lainnya.²

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pelayanan publik untuk semua orang. Islam sebagai sistem kehidupan, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau yang biasa disebut Al-Ibadat, serta hubungan manusia dengan makhluk yang disebut Al-Muamalah dalam segala aspek.³ Dalam Islam pajak disebut *dharibah* yang merupakan salah satu bentuk mu'amalah dibidang ekonomi yang berperan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama.⁴ Pajak juga diartikan sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada umat muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang telah diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi pemerintah tidak memiliki harta.⁵ Pembayaran pajak dapat

¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," *Kemenkeu perubahan*, no. 235 (2007): 245.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Direktorat Jenderal Pajak," *Pedoman Penagihan Pajak*, 2009.

³ Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.

⁴ Gusfahmi Arifin, "Pajak Menurut Syari'ah," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82, <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>.

⁵ Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam."

menopang kedaulatan negara, sebagai bentuk kemampuan negara dalam mengelola wilayahnya tanpa bantuan pihak luar. Kemandirian ini dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pembayaran pajak yang berasal dari warga negara, serta dapat menjadi gambaran kesadaran dan bukti cinta tanah air.

Pajak menjadi sumber pendanaan yang mendominasi, penerimaan pajak di Indonesia telah menunjukkan tren yang berbeda-beda setiap tahunnya. Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak yang berasal dari sumber penerimaan pajak dan bukan pajak selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023 (dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2021	2022	2023
Pajak	1.547,87	2.034,54	2.154,21
Bukan Pajak	80,65	46,31	50,44
Jumlah Penerimaan Negara	1.628,52	2.080,85	2.204,65
Persentase	111,12%	114,01%	101,83%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel yang disajikan, realisasi penerimaan pajak berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang diamanahkan pemerintah selama tiga tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, Namun besarnya penerimaan pajak tidak menggambarkan bahwa penerimaan pajak sudah maksimal. Penerimaan pajak masih belum optimal disebabkan karena adanya upaya perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.⁶

⁶ Warno Warno and Ulul Fahmi, "Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45," *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 188–201, <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9225>.

Pengenaan pajak pada dasarnya merupakan pemaksaan negara terhadap pelaku ekonomi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan mereka dengan melakukan pembayaran pajak. Hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan merupakan penerimaan bagi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁷ Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa, PPh (Pajak Penghasilan) badan menjadi kontribusi pajak terbesar kedua setelah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam negeri pada semester 1 tahun 2024. Namun sebenarnya, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan utama dari perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Sehingga terjadilah perlawanan pajak secara agresif dari wajib pajak berupa penghindaran pajak. Penghindaran pajak dibagi menjadi dua pandangan, yakni menurut pandangan tradisional penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan bentuk pengamanan kekayaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer ditujukan bagi kepentingan pribadi, tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.⁸

Dalam beberapa dekade terakhir upaya penghindaran pajak oleh perusahaan terus terjadi dan semakin terstruktur. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak.⁹ Fenomena ini dapat didorong oleh lemahnya pengawasan dan regulasi perpajakan yang ada disuatu negara. Penghindaran pajak telah menjadi isu yang krusial di Indonesia, mengingat kontribusi pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dalam mendanai pembangunan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), banyak perusahaan besar yang terindikasi menerapkan praktik penghindaran pajak, bahkan sering kali melibatkan perencanaan pajak internasional melalui

⁷ Amin Purnawan, "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.260>.

⁸ Mihir A Desai and Dhammika Dharmapala, "Corporate Tax Avoidance and Firm Value," *The Review of Economics and Statistics* 91, no. 3 (2009): 537–46.

⁹ Teza Deasvery Falbo and Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 94–110, <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>.

skema seperti *transfer pricing*, *capitalization*, serta penggunaan *tax heaven*, yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Terungkap kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT CAS, dengan skema penerbitan faktur pajak fiktif yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Direktur perusahaan, diduga menjalankan praktik ini selama periode Januari 2020 hingga Juni 2021. Tujuan dilakukan penerbitan faktur palsu untuk memanipulasi laporan pajak perusahaan agar jumlah pajak yang dibayarkan ke negara lebih kecil dari yang seharusnya. Akibatnya negara dirugikan hingga Rp.21,46 miliar.¹⁰ Modus ini dilakukan dengan cara mencatat pajak masukkan palsu melalui faktur fiktif. Pajak masukan yang dilaporkan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak keluaran dalam laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dengan demikian kewajiban pajak PT CAS menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi sebenarnya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, terutama di sektor manufaktur, yang sering kali memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan berperan dalam mendorong atau menahan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) telah menjadi isu sentral dalam dunia bisnis, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam mengendalikan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sebuah sistem pengawasan serta pengarahan yang dilakukan perusahaan untuk pengelolaan perusahaan agar lebih baik.¹¹ Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) mewajibkan perusahaan menerapkan aturan yang

¹⁰ Muhammad Wildan, "Bikin Faktur Fiktif Hingga Rp.21,46 Miliar, Direktur PT Jadi Tersangka," DDTC News, 2024, <https://search.app/QEEuuDrhRgKrmxZi6>.

¹¹ Adriyanti Agustina Putri and Nadia Fathurrahmi Lawita, "Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* Vol. 22, no. 1 (2020): No. 1: 1-11.

ditetapkan agar kinerjanya dapat dipantau dan dipertanggung jawabkan.¹² Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu mengurangi praktik penghindaran pajak. Unsur-unsur dari tata kelola perusahaan yang mempengaruhi tingkat efektif pajak seperti, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif diharapkan dapat berperan dalam memperkecil praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan, terdapat penelitian yang mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agnes Yunita Sari dan Hayu Wikan Kinasih menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.¹³ Juga penelitian yang dilakukan oleh Famela Noorica dan Ardan Gani Asalam menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.¹⁴ Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Lindri Oktavia, dkk kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁵ Serta penelitian yang dilakukan oleh Diah Retna Sumekar, dkk kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang mengungkap praktik penghindaran pajak yang disebabkan oleh independensi dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Boyke Martin dan Menik Indrati menyatakan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap

¹² Putri and Lawita.

¹³ Agnes Yunita Sari et al., “Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018,” *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2021): 1609–17.

¹⁴ Famela Noorica and Ardan Gani Asalam, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance,” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 2021.

¹⁵ Lindri Oktavia Erlin, Agus Sutarjo, and Dica Lady Silvera, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance,” *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 112–21, <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>.

¹⁶ Diah Ratna Sumekar, Sri Mulyani, and Siti Nuridah, “Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4533–41, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

penghindaran pajak.¹⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan Nyimas Wardatul Afiqoh komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.¹⁸ Menurut Marwan Faiz Hilmi dkk komisari independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.¹⁹

Selain independensi dewan komisaris, terdapat unsur lain yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yaitu komite audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana menyatakan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.²⁰ Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ali Yudhistira dan Fanny Anggraeni menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.²¹ Menurut Heni Putriyanti dan Evi Maria komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.²²

Selain itu kompensasi eksekutif juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Desri Amalia Safangah dan Nofryanti menyatakan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.²³ Berbanding

¹⁷ Boyke Martin and Menik Indrati, "Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak," *Jesya* 7, no. 2 (2024): 1445–1557, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>.

¹⁸ Uswatun Hasanah and Nyimas Wardatul Afiqoh, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2023): 20–31, <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>.

¹⁹ Marwan Faiz Hilmi et al., "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017," *Owner* 6, no. 4 (2022): 3533–40, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>.

²⁰ Dudi Pratomo and Risa Aulia Rana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 91–103, <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.

²¹ Novandina Izzatillah Firdausi, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Rasio Keuangan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>.

²² Heni Putriyanti and Evi Maria, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Manajemen Dirgantara* 15, no. 1 (2022): 149–58, <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.581>.

²³ Desri Amalia Safangah and Nofryanti, "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 8–19, <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27>.

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bill Hudha dan Dwi Cahyo Utomo menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ternyata banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga penulis melakukan penelitian kembali tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, yang diharapkan memberikan bukti baru dan memberikan arah apakah mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan menggabungkan variabel independen berupa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif. Dimana masih minim penelitian sebelumnya yang menggabungkan variabel ini, padahal interaksi antar variabel ini menciptakan keseimbangan antara pengawasan dan insentif yang dapat mempengaruhi keputusan manajerial, mengurangi konflik kepentingan, dan mendorong praktik-praktik sehat dalam perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan mengenai perpajakan yang mempengaruhi penghindaran pajak, juga digunakan sebagai referensi informasi mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan judul **“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁴ Bill Hudha and Dwi Cahyo Utomo, “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019),” *Diponegoro Journal of Accounting* 10, no. 2018 (2021): 2337–3806.

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi pembaca sekaligus penulis terutama pada bidang tata kelola perusahaan dan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait unsur-unsur yang menjadi pengaruh terjadinya praktik penghindaran pajak dan dapat diterapkan didalam kehidupan bernegara.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan dan tolak ukur bagi perusahaan agar dapat memperhatikan dampak yang akan timbul dari praktik penghindaran pajak serta dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan dijadikan sumber referensi atau rujukan untuk peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membuat tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori tentang perpajakan, penelitian sebelumnya yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini membuat metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membuat analisis serta pembahasan data yang diawali dengan gambaran umum objek penelitian, disusul dengan pengujian atau analisis data, serta hasil pengujian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membuat simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan sebuah konsep dalam ilmu manajemen dan akuntansi yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dalam sebuah perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling, teori agensi yang didasarkan pada konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak yaitu pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*).²⁵ Dalam konteks perusahaan, *principal* orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada *agent* yang mengelola perusahaan sehari-hari, dimana seharusnya bertindak demi kepentingan *principal*. Namun, karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan maka terjadilah masalah keagenan.

Permasalahan yang terjadi yaitu *moral hazard*, permasalahan yang muncul jika agen tidak melakukan suatu hal yang sudah disepakati bersama sebelumnya dalam kontrak dan *adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak mengetahui apakah sebuah keputusan yang diambil oleh agen sudah didasarkan atas informasi yang diperoleh atau terjadi karena sebuah kelalaian dalam tugas.²⁶ Oleh sebab itu dibuatlah kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara keduanya.

Teori agensi dilandaskan pada 3 asumsi untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan, serta mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya keagenan (*agency cost*).²⁷ Sehingga fokus dari teori agensi mengenai hubungan antara prinsipal dan agen yang dilandaskan oleh tiga asumsi yaitu:

²⁵ Patrick McColgan, "Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature from a UK Perspective," *Department of Accounting & Finance, University of Strathclyde, Glasgow*, 2001.

²⁶ Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi," *Ekonomika-Bisnis* 02 (02) (2010): 357–70, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694/pdf>.

²⁷ Edwin Triyuwono, "Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)," *Available at SSRN 3250329*, 2018.

1. Asumsi tentang sifat manusia menegaskan bahwasanya manusia memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan menghindari risiko.
2. Asumsi tentang keorganisasian mengemukakan munculnya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan terdapat asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Ketiga asumsi ini dapat menjadi landasan teori agensi dalam menjelaskan keterkaitan antara *principal* dan *agent*. Asumsi ini memberikan dasar pemahaman bahwa dalam hubungan antara prinsipal dan agen terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu efisiensi dan transparansi dalam organisasi. Sifat manusia yang condong mementingkan diri sendiri, keterbatasan rasionalitas, juga terdapat asimetri informasi dan pandangan terhadap informasi sebagai komoditas memperkuat pentingnya mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, hal ini cukup relevan dengan banyaknya isu dibidang akuntansi terutama *Good Corporate Governace*.²⁸

Dengan memahami asumsi-asumi ini, kita dapat melihat mengapa teori agensi menekankan akan perlunya tata kelola perusahaan yang kuat untuk memastikan keselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen, serta untuk meminimalisir potensi perilaku oportunistik yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.²⁹

²⁸ M Rizal Satria, "Peran Teori Agensi Dalam Issue Bidang Akuntansi," *Land Journal* 3, no. 2 (2022): 125–38.

²⁹ Putri and Lawita, "Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia."

Tax avoidance adalah pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai bentuk pelanggaran pajak berat sebab itu merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, serta memperkecil beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.³⁰ Masalah ini cukup unik sebab penghindaran pajak merupakan kegiatan yang diperbolehkan namun tidak diinginkan sehingga pemerintah membuat berbagai peraturan guna mencegah praktik penghindaran pajak.³¹ Secara garis besar penghindaran pajak adalah upaya pengurangan atau pengecilan jumlah bayar pajak yang dilakukan sepanjang kegiatan ini dimungkinkan oleh peraturan, atau dalam makna lain memanfaatkan celah yang terdapat didalam peraturan pajak. Ada tiga karakter penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu:

1. Terdapat unsur buatan (*artificial arrangement*) yaitu adanya peraturan seakan-akan terdapat didalamnya padahal tidak, serta dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Celah undang-undang (*loopholes*), ini sering dilakukan untuk menerapkan ketentuan legal dengan berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksud oleh para pembuat undang-undang (pemerintah).
3. Terdapat unsur kerahasiaan, dimana biasanya para konsultan menunjukkan cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan *tax avoidance* dengan syarat wajib menjaga kerahasiaan dimana ini juga termasuk karakter.³²

Penghindaran pajak erat kaitannya dengan perusahaan yang menginginkan keuntungan secara maksimal, sehingga melakukan segala cara untuk dapat mengurangi beban pajak yang harus disetorkan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan. Dalam pajak internasional, *tax*

³⁰ Wastam Wahyu Hidayat, "The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 1 (2018): 19–26.

³¹ Novi Antari Yuliana et al., "Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>.

³² Paskalis A Panjulusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105, <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.

avoidance juga digunakan untuk mencegah dikenakannya pajak ganda, dengan demikian laba usaha hanya akan dikenakan pajak disatu tempat saja, sehingga hal ini dapat menghilangkan risiko pajak berganda. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. *Transfer pricing*, dilakukan dengan cara memperbesar harga beli namun memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup, kemudian mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada grup perusahaan yang bertempat di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah.
2. *Thin capitalization*, dilakukan dengan memberikan pinjaman oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak yang berkedudukan di negara lain, yang mana perusahaan induk lebih senang memberikan dana kepada perusahaan anak dengan cara pemberian pinjaman dibandingkan pemberian dalam bentuk setoran modal. Karena, biaya bunga (biaya yang muncul atas pinjaman) bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan, sedangkan dividen (biaya yang berkaitan dengan modal) tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. *Treaty shopping*, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *tax treaty* suatu negara oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas *treaty* tersebut.
4. *Controlled foreign corporation*, dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang berasal dari luar negeri (biasanya di negara *tax heaven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri.³³

Walaupun praktik penghindaran pajak yang dilakukan masih dikategorikan legal, tetapi kegiatan ini telah mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi negara-negara yang terlibat. Tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak negara, juga dapat mempengaruhi keadilan dalam sistem perpajakan. Dimana perusahaan skala besar yang mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dapat membayarkan

³³ Ita Salsalina Lingga Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ Kristen Maranatha, “Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance),” *Jurnal Zenit* 1, no. 3 (2012): 210–21.

pajak lebih rendah dibanding dengan perusahaan skala kecil, hingga akhirnya mengarah pada ketidak setaraan beban pajak. Selain itu praktik penghindaran pajak juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perpajakan dan pemerintah. Saat masyarakat melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah menghindari kewajiban pajak, hal ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat bahwa sistem perpajakan tidak adil dan tidak setara.³⁴

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung penghindaran pajak, tetapi karena data perpajakan pada umumnya tidak tersedia untuk konsumsi umum, maka peneliti menggunakan data yang tersedia di dalam laporan keuangan yang dapat diakses melalui BEI atau situs resmi perusahaan. Penghindaran pajak dapat dihitung dengan ETR (*effective tax rate*), merupakan rasio pajak yang dikeluarkan untuk keuntungan sebelum pajak pada periode tertentu, sehingga dengan *effective tax rate* (ETR) maka manajer dapat mengetahui efektifitas perencanaan pajak perusahaan, yang menggunakan angka dari laporan laba rugi. Tujuannya untuk mengetahui beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Proksi *effective tax rate* (ETR) adalah sebagai berikut:³⁵

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), ini lebih tepat untuk menilai penghindaran pajak karena ETR perusahaan sering digunakan para pihak yang berkepentingan sebagai acuan untuk merancang sistem pajak perusahaan, ini disebabkan karena ETR memiliki informasi kompleks. Penggunaan ETR dianggap dapat menggambarkan keseluruhan beban pajak yang akan berdampak kepada laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

³⁴ Aqilla Athaya and Ersi Sisdianto, "Strategi Penghindaran Pajak Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak Analisis Kasus Pada Industri Multinasional," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2024): 7–17.

³⁵ S E Zef Arfiansyah and M Acc Fin, "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 4, no. 2 (2020): 67–76.

Dalam Islam, pada masa itu Rasulullah mewajibkan kepada orang muslim membayar kewajibannya berupa zakat dan nonmuslim diwajibkan membayar *jizyah*, *khara*, dan *usyr*.³⁶ Allah SWT memerintahkan manusia untuk jujur dan menunaikan amanah (tanggung jawab) yang diberikan, pajak dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Membayar pajak merupakan suatu bentuk pemenuhan amanah dan keadilan sosial, dimana harta yang dimiliki sebagian dialokasikan untuk kepentingan umum, hal ini mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat luas dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Sehingga prinsip ini selaras dengan QS An-Nisa ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

Corporate governance atau tata kelola perusahaan digunakan untuk mengontrol perusahaan yang penuh ketidak pastian. Tata kelola perusahaan mengacu pada mekanisme, proses serta hubungan yang digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan perusahaan.³⁷ *Corporate governace* adalah sebuah sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi, selain itu struktur *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga tujuan perusahaan dapat

³⁶ Ali Murtadho Emzaed et al., "Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1094>.

³⁷ Miladiasari Miladiasari et al., "The Effect of Environmental Performance and Environmental Cost on Financial Performance with Good Corporate Governance as the Moderating Variable," no. 32 (2021), <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303857>.

dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan baik.³⁸ Adapun manfaat dalam penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. Memperkecil biaya yang timbul dari adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (*agency cost*).
2. Proses pengambilan keputusan akan lebih terstruktur sehingga menghasilkan keputusan yang lebih optimal, dan dapat meningkatkan efisiensi serta terwujudnya budaya kerja yang sehat.
3. Mengurangi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengelola perusahaan, sehingga meminimalisir kerugian bagi perusahaan dan pihak lain.
4. Meningkatkan nilai perusahaan dimata investor disebabkan meningkatnya kepercayaan investor kepada pengelola perusahaan.
5. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.³⁹

Setiap perusahaan wajib memastikan bahwa untuk mencapai keseimbangan perusahaan perlu diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan perusahaan.
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan tanggung jawab badan hukum untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik.
3. Responsibilitas yaitu responsibilitas yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

³⁸ Putri and Lawita, "Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia."

³⁹ Jojok Dwiridotjahjono, "Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar* 5, no. 2 (2009): 101–12.

4. Kemandirian yaitu keadaan dimana operasi bisnis dijalankan secara profesional tanpa keterbatasan dari konflik kepentingan atau paksaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan hukum, regulasi, atau prinsip integritas perusahaan.
5. Kewajaran yaitu penegakan hak-hak pihak berwenang secara proporsional dan seimbang, dengan patokan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁴⁰

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia perlu memahami tata kelola perusahaan yang baik dalam perspektif Islam yang dikenal dengan *Islamic Good Corporate Governance*, yang berdasarkan pada paradigma tauhid. Dimana perusahaan bukan hanya alat untuk mencapai kekayaan tapi juga sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui nilai-nilai spiritual. Karyawan memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggung jawabannya kepada Allah SWT (*ultimate stakeholder*).⁴¹ Menurut perspektif Islam terdapat nilai-nilai pelaksanaan *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Nilai tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama ajaran Islam, maka nilai tauhid dapat memperkuat implementasi *good corporate governance* dengan memasukkan prinsip spiritual dan etika yang kuat dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Nilai khilafah

Nilai khilafah menekankan kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dimana perusahaan sebaiknya dikelola dengan etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam keputusan yang diambil.

⁴⁰ Irsil Meilani Nima et al., "Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>.

⁴¹ Muhammad Sulton Arif and Mohamad Djasuli, ""Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al- Qur ' an)," " *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial ,E-ISSN: 2747-0938*" 2, no. 2 (2022): 207–18.

3. Nilai ibadah

Dalam Islam ketaatan memiliki dimensi vertikal dan horizontal, sehingga dengan memadukan aspek spiritual dan etika dalam tata kelola perusahaan tidak hanya dampak ekonomi yang didapatkan tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

4. Nilai tazkiyah

Nilai ini tercermin dalam kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan menerapkan tazkiyah, perusahaan dapat meningkatkan budaya etis dan integritas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan tanggung jawab dan membantu memastikan keseimbangan antara tujuan material serta tanggung jawab moral kepada Allah SWT, manusia dan alam semesta.⁴²

Sebenarnya dasar yang menekankan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam Islam masih belum pasti, namun ada beberapa pernyataan dalam ayat Al-Quran mengenai tata kelola perusahaan yang baik, seperti dalam surat Hud ayat 61 dan surat Al-Hajj ayat 41 yang menjelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi dan di ayat kedua dijelaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaannya untuk mendirikan shalat dan suasana yang tertata untuk masyarakat memenuhi kebutuhan.⁴³

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya.⁴⁴ Investor institusional dianggap sebagai pihak yang efektif dalam melakukan pengawasan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer, karena dengan meningkatkan kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi dan dipantau oleh pihak institusi

⁴² Mia Ade Asvianty, Mukhammad Kharis Wildan Laksono, and Mohamad Djasuli, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Bidang Perindustrian Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 929–32, <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i3.351>.

⁴³ Ratno Agriyanto, Azizah Setiyawati, and Dessy Noor Farida, "The Effect of Good Corporate Governance, Free Cash Flow, and Tax Planning on Earnings Management," *At-Taqaddum* 13, no. 1 (2021): 1–20.

⁴⁴ Putriyanti and Maria, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi."

atau lembaga.⁴⁵ Kepemilikan institusional cenderung lebih peduli dengan reputasi perusahaan termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu pemilik institusional biasanya menuntut tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena institusi dengan ukuran besar lebih memilih stabilitas jangka panjang dari pada hanya sekedar keuntungan dalam jangka pendek dari hasil penghindaran pajak. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemilikan institusional:

1. Ukuran kepemilikan

Ditemukan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat pengawasan terhadap manajemen perusahaan, yang kemudian dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.⁴⁶

2. Kualitas pemilik institusional

Institusi yang bereputasi, memiliki sumber daya, dan pengalaman yang lebih luas dalam mengelola portofolio perusahaan cenderung lebih efektif dalam mengawasi manajemen. Institusi dengan tata kelola yang baik biasanya lebih berhati-hati dalam mendukung atau menolak kebijakan yang berisiko seperti strategi penghindaran pajak yang agresif.⁴⁷

3. Jangka waktu investasi

Pemilik institusional dengan perspektif investasi jangka panjang, seperti dana pensiun atau asuransi, biasanya lebih peduli dengan keberlangsungan jangka panjang perusahaan dan risiko reputasi, sehingga institusi lebih aktif dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dan sebaliknya pemilik dengan perspektif

⁴⁵ Ni Putu P.D Wida and I Wayan Suartana, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9, no. 3 (2014): 575–90, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9317>.

⁴⁶ Rizki Afrika, "Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak," *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2021): 132, <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>.

⁴⁷ Fenny Marietza and Indah Oktari Wijayanti, "Pengaruh Pandangan Investasi Investor Institusional Terhadap Kredit Rating Perusahaan," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2021): 293–303, <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30256>.

jangka pendek mungkin lebih fokus pada peningkatan keuntungan sesaat, sehingga pengawasan terhadap manajemen bisa lebih lemah.⁴⁸

Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih kuat, hal ini tidak hanya mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Peningkatan pengawasan ini dapat mendorong manajemen untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih etis dan patuh terhadap regulasi perpajakan, sehingga peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak menjadi lebih kecil.

Dalam Islam kepemilikan pada dasarnya merupakan hak Allah SWT dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini dilandasi dalam QS Al-Maidah ayat 120, ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan atas segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, manusia hendaknya menggunakan harta dan sumber daya dengan rasa amanah dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama.

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّۙ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ

Artinya: hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada didalamnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu

2.1.3.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari keanggotaan dewan komisaris, dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam mengawasi manajemen perusahaan.⁴⁹ Peran utama dewan komisaris independen yakni mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen serta melindungi

⁴⁸ Marietza and Wijayanti.

⁴⁹ Martin and Indrati, "Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak."

kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris independen harus bersikap objektif tanpa dilandasi dengan adanya konflik kepentingan.

Peran dewan komisaris independen yang mewajibkan bersikap objektif dan tidak berpihak dapat dihubungkan dengan prinsip keadilan dan amanah yang relevan dengan QS An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa seseorang harus berlaku adil serta menjadi saksi yang objektif, bahkan bila keluarganya ikut terlibat. Hal ini sejalan dengan peran dewan komisaris independen yang harus menegakkan keadilan tanpa memandang kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen yang objektif dapat membantu memastikan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan amanah dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya jumlah dewan komisaris independen yang sesuai dengan standar yang ditentukan, ini akan membantu perusahaan mengurangi tindakan penghindaran pajak dan membuat pengawasan oleh komisaris independen dapat dilakukan secara maksimal.⁵⁰ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20 dalam hal dewan komisaris terdiri

⁵⁰ Hendi Hendi and Dea Fanny, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 1044–58, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>.

lebih dari 2 orang dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.⁵¹

Pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen dapat memperkecil masalah keagenan dan akhirnya kesempatan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak dapat dikurangi, dengan memastikan bahwa perusahaan melakukan praktik-praktik transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan keadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku di sebuah negara.⁵²

2.1.3.3 Komite Audit

Komite audit merupakan komite bentukan dari dewan komisaris yang memiliki jumlah minimal tiga orang dalam sistem tata kelola perusahaan Indonesia.⁵³ Komite audit kemudian bertanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama dalam pengawasan laporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit merupakan unsur penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. BEI mengharuskan perusahaan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh dewan komisaris independen, dengan harapan komite audit dapat memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.⁵⁴ serta dengan adanya komite audit perusahaan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti *responsibility, fairness dan transparency*

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik,” 2014, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf).

⁵² Sagita Feby Riskina Haloho, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019),” *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2021): 705–19, <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147>.

⁵³ Meyjerd Rombebunga, “Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak,” *Perspektif Akuntansi* 2, no. 3 (2019): 249–67, <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>.

⁵⁴ Bunga Citra Sidabutar, Pelinta Tarigan, and Ganda Siahaan, “Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)” 1, no. 1 (2020): 51–66.

Ketentuan untuk menjadi anggota komite audit mencakup beberapa persyaratan penting yang dirancang untuk memastikan bahwa anggota memiliki kompetensi, independensi, dan kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan perusahaan. Syarat-syarat untuk menjadi anggota komite audit mencakup beberapa ketentuan penting sebagai berikut:⁵⁵

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, sesuai dengan bidang pekerjaannya, juga mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan perusahaan publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan;
6. Bukan orang kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance* dan *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
8. Tidak memiliki saham langsung atau tidak langsung pada perusahaan publik;
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham perusahaan publik tersebut; dan

⁵⁵ Nomor: KEP-643/BL/2012, “Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan” 2004 (2012).

10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan publik tersebut.

Dengan adanya syarat-syarat ini komite audit diharapkan kompeten dalam mengawasi kegiatan perusahaan serta dapat meminimalisir masalah keagenan yang akan timbul akibat dari adanya rencana pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun peran komite audit sebagai penunjang dewan komisaris yaitu untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang ada, susunan pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.⁵⁶

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya memilih orang yang memiliki kompetensi dan kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab yaitu dalam QS Qashash ayat 26. Ayat ini menegaskan bahwa dalam memilih seseorang untuk tugas yang penting, hendaknya memperhatikan kompetensi dan kepercayaan.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ أَسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2.1.3.4 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah sebuah imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan untuk pihak eksekutif yang dalam hal ini terdiri dari direksi dan komisaris atas segala kinerjanya terhadap perusahaan.⁵⁷ Kompensasi eksekutif biasanya terdiri dari dua komponen yakni kompensasi tetap yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, serta

⁵⁶ Metta Kusumaningtyas and Dessy Noor Farida, “Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba,” 2016, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:168778090>.

⁵⁷ Desri Amalia Safangah and Nofryanti, “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak.”

kompensasi variabel, yang terdiri dari bonus atau insentif berbasis kinerja yang berkaitan dengan pencapaian target tertentu, termasuk target keuangan perusahaan.

Kompensasi eksekutif dapat berupa material atau non material yang diberikan agar eksekutif termotivasi dalam mencapai suatu tujuan diperusahaan, ini merupakan cara terbaik untuk efisiensi pajak perusahaan sehingga eksekutif akan meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi.⁵⁸ Berdasarkan teori agensi, pemberian kompensasi menjadi solusi dalam menekan perilaku oportunistik eksekutif dengan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Insentif yang tepat, seperti bonus berbasis kinerja atau kepemilikan saham, dapat memotivasi eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang dan membuat keputusan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan serta mendorong manajemen untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan tidak akan dirugikan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 22, ayat ini menjadi cerminan tentang upah yang layak kepada setiap pekerja, ayat ini juga menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan sumbangsihnya dalam pekerjaan.⁵⁹

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَشَجَرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan.

Hal ini relevan dalam memberikan upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai kontribusi mereka, termasuk dalam pemberian kompensasi eksekutif yang adil dan proporsional. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya penghargaan yang sepadan atas

⁵⁸ Fitri Wulandari, Masripah Masripah, and Ni Putu Eka Widyastuti, "Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," in *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, vol. 1, 2020, 569–86.

⁵⁹ Muhammad Tahmid Nur, "Kompensasi Kerja Dalam Islam," *Jurnal Muamalah* V, no. 2 (2015): 120–28.

usaha yang telah dilakukan, yang tidak hanya mencerminkan keadilan tetapi juga memotivasi kinerja secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini diuraikan pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nensi Yuniarti, Elvis Nopriyanti dan Dewi Nopita (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani dan Siti Nuridah (2023)	Analisis Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada	1. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Keuangan di BEI	penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Agnes Yunita Sari dan Hayu Wikan Kinasih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	1. profitabilitas memiliki pengaruh signifikan penghindaraan pajak. 2. kepemilikan institusional, leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Sevi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Pengaruh Leverage, <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah	1. komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	model analisis regresi data panel.	2. kepemilikan institusional, leverage, <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Uswatun Hasanah dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	1. komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. kinerja keuangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Anggita Putri, MG Kentris dan Jacobus	Pengaruh Komite Audit, Karakter dan Kompensasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model	1. komite audit berpengaruh negatif signifikan

	Widiatmo (2024)	Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI	analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	terhadap penghindaran pajak. 2. kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	Janet Devira Sondakh dan Maria Yosaphat Dedi Haryanto (2021)	Pengaruh Faktor Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif, Prinsip Konservatis Terhadap Penghindarn Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	1. koneksi politik kompensasi eksekutif dan konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Ilma Nursavida, Bambang Wicaksono, Oktavima Wisdaningrum (2023)	Pengaruh Koneksi Politik, Karakter Eksekutif dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	1. koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap

				penghindaran pajak. 3. komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Boyke Martin dan Menik Indrati (2024)	Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	1. keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan pada	1. kepemilikan institusional mempunyai pengaruh dengan arah negatif

		Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	penelitian ini adalah model analisis regresi data panel.	terhadap penghindaran pajak. 2. komisaris independen mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. 3. komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, bank bahkan investor luar negeri.⁶⁰ Institusi biasanya memiliki kepentingan jangka panjang dan lebih menekankan transparansi juga reputasi dalam sebuah perusahaan. Sehingga mereka lebih berhati-hati dan cenderung mengawasi perilaku manajerial secara lebih aktif, terutama dalam hal risiko yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi, ini akan berdampak pada pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Investor institusional memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memantau aktivitas manajerial dengan lebih intensif. Pengawasan ini menekan pihak manajer perusahaan mematuhi aturan dan mengurangi aktivitas penghindaran pajak yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Teori agensi menjelaskan bahwa kepemilikan institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Institusi yang mempunyai saham akan mendorong kebijakan yang menguntungkan perusahaan dan pemegang saham. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar juga beban pajak yang wajib disetorkan oleh perusahaan. Ini disebabkan karena semakin kecil kesempatan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang besar dan kepemilikan hak suara yang tinggi dapat mengarahkan manajer untuk dapat fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari perilaku memetingkan diri sendiri.⁶¹

Asumsi ini didukung oleh hasil penelitian Lindri Erlin, dkk (2023) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax*

⁶⁰ Sumekar, Mulyani, and Nuridah, "Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022."

⁶¹ Erlin, Sutarjo, and Dica Lady Silvera, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance."

avoidance dan Diah Retna Sumekar, dkk (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen termasuk bagian dari *good corporate governance*. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lain, serta pemegang saham juga bebas dari hubungan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.⁶² Dengan itu dewan komisaris independen dipandang dapat mengawasi dan bertindak objektif dalam akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Dewan komisaris independen diharapkan mampu menegakkan standar etika yang tinggi dan dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum termasuk peraturan perpajakan, karena dewan komisaris independen tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan serta tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan. Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang memantau aktivitas dan keputusan manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak. Karena dengan melakukan penghindaran pajak sebuah perusahaan bisa mendapatkan reputasi yang buruk dan memicu risiko hukum.

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris independen dapat mengurangi konflik agensi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang akan diambil, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pajak, karena

⁶² Fatimah Sa'diah and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Transfer Pricing," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 3 (2021): 501–16, <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>.

adanya pengawasan ketat dari dewan komisaris independen.⁶³ Jadi semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan.

Asumsi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sevi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dan Dudi Pranomo dan Risa Aulia Rana (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta menjalankan bisnis berdasarkan etika agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam perusahaan.⁶⁴ Komite audit memiliki tujuan memantau kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi, termasuk penghindaran pajak. Komite audit yang aktif juga efektif, akan memastikan manajemen untuk mematuhi kebijakan perpajakan yang ada dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang dapat dilakukan manajemen pada sebuah perusahaan.⁶⁵

⁶³ Sevi Lestya Dewi and Rachmawati Meita Oktaviani, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 179–94, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>.

⁶⁴ Sumekar, Mulyani, and Nuridah, "Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022."

⁶⁵ Hasanah and Wardatul Afiqoh, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak."

Komite audit bertanggung jawab meninjau dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan adanya praktik penghindaran pajak dapat berimplikasi pada pelaporan pajak dan akuntansi yang kurang transparan. Dengan ini komite audit diharapkan kompeten dalam mengawasi kegiatan perusahaan serta dapat meminimalisir masalah keagenan yang akan timbul akibat dari adanya rencana pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Asumsi ini didukung dengan penelitian Uswatun Hasanah dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Marwan Faiz Hilmi, dkk (2022) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diberikan kepada eksekutif dalam hal ini direksi dan komisaris atas tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya. Kompensasi diberikan untuk memotivasi manajemen eksekutif untuk melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya.⁶⁶ Kompensasi yang berupa imbalan dapat membuat eksekutif termotivasi untuk memenuhi tujuan utama perusahaan yaitu profitabilitas. Salah satu cara untuk mencapai tujuan dengan mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dengan pemberian kompensasi ini, eksekutif memiliki motivasi yang tinggi untuk merancang strategi perpajakan.⁶⁷

⁶⁶ Desri Amalia Safangah and Nofryanti, "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak."

⁶⁷ Anggita Putri Cahyani, M. G. Kentris Indarti, and Jacobus Widiatmoko, "Pengaruh Komite Audit, Karakter Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Berdasarkan teori agensi, disebutkan bahwa manajemen bersifat oportunistik, yang artinya dengan memberikan kompensasi yang tinggi dapat memberikan motivasi kepada pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang utama melalui pembayaran pajak efektif. Oleh karena itu jika pihak eksekutif memperoleh keuntungan yang besar maka mereka dapat membuat keputusan untuk meminimalkan pajak. Sehingga jika kompensasi eksekutif tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya juga akan tinggi. Asumsi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Anggun (2024) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Juga penelitian yang dilakukan oleh Anggita dkk (2024) kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

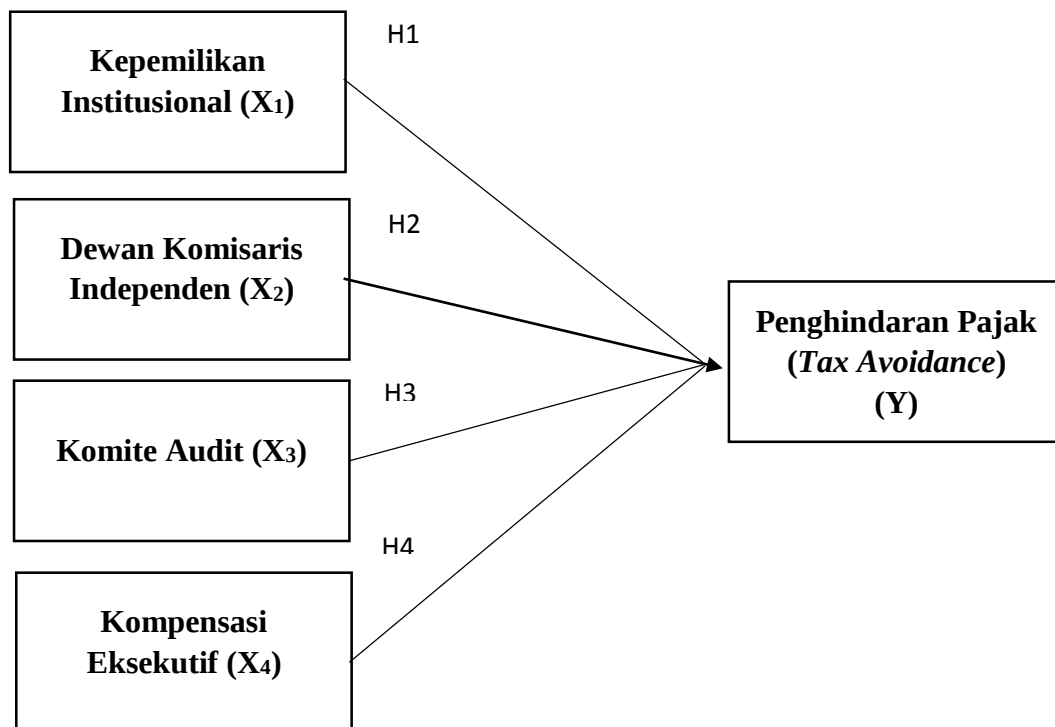
Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel independen yang kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel tersebut terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif. Informasi dari variabel yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang mana data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui website BEI yakni www.idx.co.id.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini yakni perusahaan yang bergerak disektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Berdasar data yang yang tersedia di BEI, sektor manufaktur dibagi menjadi tiga sub sektor utama yakni:

1. Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia
2. Sub Sektor Aneka Industri
3. Sub Sektor Industri Barang Konsumsi

Sehingga terdapat 166 perusahaan terdaftar di BEI yang termasuk dalam perusahaan sektor manufaktur. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Perusahaan tersebut melakukan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2019-2023 secara runtut.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023

4. Perusahaan dengan ketersediaan informasi tata kelola perusahaan terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif yang digunakan dalam penelitian.
5. Perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui perhitungan ETR.
6. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan.

Berdasarkan teknik pengaambilan sampel tersebut didapatkan sampel terpilih sebanyak 15 perusahaan. Sehingga jumlah data yang diperoleh selama tahun 2019-2023 sebanyak 75.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial statements*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023 melalui website www.idx.co.id atau website resmi masing-masing perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa literatur, seperti buku, jurnal penelitian bahkan skripsi terdahulu yang bermanfaat untuk mendapatkan teori yang relevan.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.4.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* merupakan strategi manajemen pajak yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*).

Effective Tax Rate merupakan seluruh beban pajak penghasilan perusahaan yang dibagi dengan laba sebelum pajak. Perusahaan dengan nilai ETR rendah dapat dianggap tinggi tingkat penghindaran pajaknya, dan sebaliknya jika nilai ETR yang dihasilkan tinggi, maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan rendah, sehingga perusahaan tidak terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ETR adalah:⁶⁸

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau dikenal dengan variabel bebas, yang menjadi sebab timbulnya atau yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kompensasi eksekutif.

3.4.2.1 Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional yang dimiliki lembaga seperti bank, asuransi, reksa dana perseroan badan, dan lembaga institusi lain dapat dinilai dengan membagi total saham yang dimiliki oleh investor institusi dengan jumlah saham yang beredar.⁶⁹ Adapun rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Oleh Institusi}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

3.4.2.2 Dewan Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen dapat dinilai dengan cara membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan

⁶⁸ Rimah Noviyani and Prisila Damayanty, "The Effect Of Good Corporate Governance, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024): 2433–43.

⁶⁹ Hasanawi Masturi, Asyrafinafilah Hasanawi, and Adib Hasanawi, "Jurnal Inovasi Penelitian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 1–208.

komisaris yang terdapat didalam perusahaan.⁷⁰ Adapun rumus yang dapat digunakan:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.4.2.3 Komite Audit

Variabel komite audit dapat dinilai dengan cara menjumlah seluruh komite audit yang terdapat diperusahaan. Komite audit merupakan komite bentukan dari dewan komisaris yang memiliki jumlah minimal tiga orang dalam sistem tata kelola perusahaan Indonesia.⁷¹ Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengukur komite audit sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{jumlah komite audit}$$

3.4.2.4 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif diharapkan dapat memotivasi eksekutif untuk dapat efisien biaya termasuk biaya pajak. Kompensasi eksekutif diproksikan dengan logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris selama setahun yang dapat langsung dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasi perusahaan.⁷² Ini dapat berupa total gaji, tunjangan, upah, bonus, saham, opsi saham atau semua kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series* dan dilakukan

⁷⁰ Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, and Melony Nurjul Yantine, “Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak,” 2019, 164–77, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>.

⁷¹ Rombebunga, “Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak.”

⁷² rina trisnawati bika juwarno, “Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Family Ownership Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak” 10, no. 2 (2019): 71–76.

dengan bantuan program perangkat lunak Eviews.⁷³ Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian statistik mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai suatu hal. Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal atau rasio.⁷⁴ Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan sebagai langkah awal merapikan data sebelum dilaksanakan, agar memudahkan pembaca atau pengguna informasi untuk dapat memanfaatkan data.⁷⁵

3.5.2 Metode Estimasi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan analisis data panel dengan bantuan software Eviews dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, antara lain:

3.5.2.1 Common Effect Model (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel paling sederhana, hanya terdiri dari kombinasi data *time series* dan *cross section*. Sedangkan dimensi waktu maupun individu pada model ini tidak diperhatikan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.⁷⁶

⁷³ I Gede Nyoman Mindra Jaya and Neneng Sunengsih, "Kajian Analisis Regresi Dengan Data Panel," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 2009, 51–58, https://eprints.uny.ac.id/12187/1/M_Stat_6_GEDE_NYOMAN.pdf.

⁷⁴ Bernard D. Coleman and Raymond M. Fuoss, "Quaternization Kinetics. I. Some Pyridine Derivatives in Tetramethylene Sulfone," *Journal of the American Chemical Society* 77, no. 21 (1955): 5472–76, <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>.

⁷⁵ Lilih Deva Martias, "Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi," *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 16, no. 1 (2021): 40, <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>.

⁷⁶ Sania Salsabila and Mukti Raya Dewi, "Analisis Harga Saham Pada Sektor Kesehatan Menggunakan Regresi Data Panel," *Jurnal Riset Dan Aplikasi Matematika* 06, no. 02 (2022): 117–28, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jram/article/view/18727>.

3.5.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang digunakan ketika terdapat efek individual yang tidak teramati namun tetap konstan sepanjang waktu untuk setiap unit observasi. Model ini mengasumsikan bahwa karakteristik unik dari setiap unit yang mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak berubah seiring waktu. Dengan FEM, kita dapat mengontrol variasi yang bersifat spesifik untuk setiap unit sehingga memperoleh estimasi yang lebih akurat.⁷⁷

3.5.2.3 Random Effect Model (REM)

Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan individual (unit spesifik seperti perusahaan, negara, atau individu) adalah acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Dalam REM, efek individual dianggap sebagai komponen acak dalam error term yang dapat membantu mengurangi kemungkinan bias dalam estimasi, terutama saat perbedaan antar unit observasi diyakini tidak bersifat tetap.⁷⁸

3.5.3 Pemilihan Regresi Data Panel

Dari tiga model yang telah diestimasi melalui pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* untuk memilih model mana yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

3.5.3.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, antara *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dengan dasar pengambilan

⁷⁷ Salsabila and Dewi.

⁷⁸ Salsabila and Dewi.

keputusan uji chow jika nilai probability $F < 0,05$ maka model yang terpilih FEM, dan sebaliknya jika nilai probability $F > 0,05$ maka model yang terpilih CEM.⁷⁹

3.5.3.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan setelah uji chow, tujuannya untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, apakah *random effect model* (REM) lebih baik dari pada *fixed effect model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan uji hausman jika probability *cross section random* $> 0,05$. Maka model yang terpilih adalah REM dan sebaliknya jika nilai probability *cross section random* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah FEM.⁸⁰

3.5.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji lagrange multiplier dilakukan setelah uji hausman, yang bertujuan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, apakah *common effect model* (CEM) lebih baik dari pada *random effect model* (REM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan uji lagrange multiplier yaitu jika nilai Breusch-Pagan *cross section* $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah CEM, sebaliknya jika Breusch-Pagan *cross section* $< 0,05$. Maka model yang terpilih adalah REM.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan tepat dan valid, dilakukan uji asumsi klasik, tujuannya untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan bebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi

⁷⁹ Aris Munandar, “Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara “Negara Asia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 1 (2017): 59–67, <https://doi.org/10.36982/jiegm.v8i1.246>.

⁸⁰ Munandar.

syarat yang diperlukan untuk memastikan kualitas regresi yang optimal.⁸¹ Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas.

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah metode yang bertujuan untuk menentukan apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal ditandai dengan pola simetris, di mana nilai modus, mean, dan median berada di tengah. Salah satu cara menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera, yang hasilnya dapat ditentukan berdasarkan nilai probabilitasnya. Jika nilai probability Jarque-Bera lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka data dapat dianggap berdistribusi normal.⁸² Dalam uji normalitas, jika data sampel penelitian terdiri dari ratusan pengamatan, distribusi data dapat diabaikan. Berdasarkan teorema limit pusat, jika data sampel mendekati distribusi normal, maka distribusi sampling juga akan mengikuti pola normal. Pada sampel yang besar (lebih dari 30 atau 40 pengamatan), distribusi sampling cenderung normal, terlepas dari bentuk distribusi awal data. Bahkan, rata-rata dari sampel acak dari distribusi apa pun akan secara alami membentuk distribusi normal, meskipun normalitas sering dianggap sebagai konsep yang tidak mutlak.⁸³

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa model regresi memiliki korelasi tinggi atau sempurna antara variabel independen yang digunakan. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada

⁸¹ Nanda Yoga Aditiya, Elsa Saphira Evani, and Siti Maghfiroh, "Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda," *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* 2, no. 2 (2023): 102–10, <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>.

⁸² Anisa Fitri et al., *Dasar-Dasar Statistika Untuk Penelitian*, Yayasan Kita Menulis, 2023, [https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4882/1/Anisa %2C Buku Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian.pdf](https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4882/1/Anisa%20Buku%20Dasar-dasar%20Statistika%20untuk%20Penelitian.pdf).

⁸³ Asghar Ghasemi and Saleh Zahediasl, "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians," *International Journal of Endocrinology and Metabolism* 10, no. 2 (2012): 486–89, <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>.

fungsi linier yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen.⁸⁴ Sedangkan regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dengan dasar pengambilan keputusan jika koefisien korelasi menunjukkan lebih besar dari $> 0,8$ maka dinyatakan bahwa terdapat multikolineritas pada model. Dan sebaliknya jika $< 0,8$ maka dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada data dalam regresi.

3.5.4.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. heteroskedastisitas muncul karena adanya varian pada variabel model regresi yang tidak sama. Jika nilai signifikansinya antara variabel independen dengan absout residual $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸⁵

3.5.5 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk menentukan seberapa banyak variabel independen dapat menjeaskan variabel dependen. Adapun koefisien determinan berkisar antara 0,1. Jika semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 1 maka menggambarkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan keseluruhan informasi yang diperlukan variabel dependen.⁸⁶

3.5.6 Uji Regresi Data Panel

Uji regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Biasanya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan

⁸⁴ GUN - MARDIATMOKO, "Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda," *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (2020): 333–42, <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.

⁸⁵ Siti Mar'atush Sholihah et al., "Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda," *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* 2, no. 2 (2023): 102–10.

⁸⁶ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

data *cross section* dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil, biasa disebut *ordinary least square* (OLS). Regresi data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dalam artian data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Persamaan regresi data panel yaitu: ⁸⁷

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_n + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel Dependen

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi 1

β_2 = Koefisien Regresi 2

β_n = Koefisien Regresi n

X_{it} = Variabel Independen

i = Individu Ke-i

t = Periode Ke-t

e_{it} = *Error Cross Section* Ke-I dan Waktu Ke-t

3.5.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan mengenai kebenaran suatu pernyataan atau klaim tentang parameter populasi berdasarkan analisis data yang diperoleh dari sampel. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut.

3.5.7.1 Uji t (Parsial)

Uji t atau biasa disebut uji parsial, digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel

⁸⁷ Muhammad Iqbal, "Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis "," *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, no. 2 (2015): 7.

atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.⁸⁸ Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) dalam analisis regresi berdasarkan nilai t hitung dan t tabel, jika probability $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika probability $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.7.2 Uji F (Simultan)

Uji f dikenal dengan uji serentak, untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Atau untuk menguji apakah model regresi yang dibuat baik (signifikan) atau tidak baik (non signifikan).⁸⁹ Dasar pengambilan keputusan uji f (simultan) dalam analisis regresi adalah jika probability $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika probability $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

⁸⁸ Amelia Tahitu, Alex Robert Tutuhaturunewa, and Vina Maria Fadirubun, "Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Gaya Kepemimpinan Lurah Milenial Di Kota Ambon," *Jurnal BADATI* 6, no. 1 (2024): 53–72.

⁸⁹ Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang mana semua informasi didapatkan dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. Dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

Jumlah populasi yang menjadi bahan untuk penelitian yaitu sebanyak 166 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, namun hanya sebagian perusahaan yang memenuhi kriteria yang akan dianalisis untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan manufaktur. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data perusahaan selama 5 tahun berturut-turut yakni tahun 2019-2023, sehingga diperoleh sampel sebanyak 75 data. Kriteria dalam penelitian sampel melalui metode *purposive sampling* sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.	166
2.	Perusahaan yang tidak melakukan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2019-2023 secara runtut.	(82)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2023.	(17)
4.	Perusahaan tidak menyediakan informasi tata kelola perusahaan terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif yang digunakan dalam penelitian.	(1)

5.	Perusahaan yang tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui perhitungan ETR.	(38)
6.	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan.	(13)
Total Sampel: 15 x 5 = 75		

Berdasarkan total sampel perusahaan yang didapat dari proses pemilihan sampel, berikut daftar perusahaan manufaktur yang terpilih menjadi sampel:

Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

No.	Nama Perusahaan
1.	Selamat Sempurna Tbk (SMSM)
2.	Siantar Top Tbk (STTP)
3.	Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
4.	Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
5.	Indocement Tunggul Prakasa Tbk (INTP)
6.	Kalbe Farma Tbk (KLBF)
7.	Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)
8.	Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)
9.	Cahaya Kalbar Tbk (CEKA)
10.	Mayora Indonesia Tbk (MYOR)
11.	Arwana Citramulia Tbk (ARNA)
12.	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Tbk (SIDO)
13.	Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI)
14.	Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)
15.	Astra International Tbk (ASII)

Perusahaan manufaktur merupakan entitas bisnis yang berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi melalui proses produksi yang terstruktur. Di Indonesia perusahaan manufaktur dikategorikan menjadi 3 sub sektor yaitu, sub sektor industri dasar dan kimia, sub sektor aneka industri dan sub sektor industri barang konsumsi. Berikut gambaran umum perusahaan manufaktur yang menjadi sampel pada penelitian:

1. Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif, terutama filter, radiator, dan komponen kendaraan. Berdiri sejak tahun 1976, SMSM telah menjadi salah satu pemasok di pasar domestik dan internasional dengan produk-produk berkualitas yang diekspor ke lebih dari 120 negara. Sebagai bagian dari ADR Group, SMSM dikenal dengan merek-merek unggulan seperti Sakura untuk filter dan ADR Radiator untuk sistem pendingin kendaraan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMSM ini memiliki reputasi kuat atas inovasi, efisiensi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. SMSM juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasionalnya untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

2. Siantar Top Tbk (STTP)

PT Siantar Top Tbk adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang didirikan pada tahun 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1989. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi berbagai jenis makanan ringan, seperti mie, biskuit, wafer, kerupuk, permen, dan kopi instan, yang dipasarkan di dalam negeri maupun diekspor ke berbagai negara di Asia dan Timur Tengah. Dengan pabrik yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sidoarjo, Medan, Bekasi, dan Makassar, PT Siantar Top Tbk terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1996 dengan kode saham STTP ini berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, halal, serta memenuhi standar legalitas yang jelas.

3. Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar yang bergerak di bidang produk konsumen, dengan portofolio merek-merek ternama di Indonesia seperti Rexona, Lifebuoy, Dove, Pepsodent, dan Blue Band. Didirikan pada tahun 1933, Unilever Indonesia telah menjadi pemimpin

pasar dalam kategori produk perawatan pribadi, perawatan rumah tangga, dan makanan & minuman. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR, Unilever Indonesia berfokus pada keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), inovasi produk, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Unilever Indonesia juga terus memperkuat posisinya di pasar dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan sosial.

4. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi pakan ternak, pembibitan ayam, dan pengolahan makanan berbasis unggas. Berdiri sejak tahun 1972, CPIN telah menjadi pemegang pasar dalam industri pakan ternak dengan merek dagang terkenal seperti Royal Feed. Perusahaan ini juga mengelola integrasi bisnis yang mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produksi bibit ayam hingga distribusi produk unggas olahan, seperti nugget dan sosis dengan merek Golden Fiesta dan Champ. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CPIN.

5. Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP)

PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dengan merek dagang, Tiga Roda. Didirikan pada tahun 1975, perusahaan ini memiliki 13 pabrik semen yang sebagian besar bertempat di Jawa Barat, dengan kapasitas produksi lebih dari 24 juta ton per tahun. Selain memproduksi berbagai jenis semen, Indocement juga bergerak dalam produksi beton siap pakai dan pengelolaan tambang. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INTP, Sebagai perusahaan yang mengusung visi “Menjadi produsen semen terkemuka di Indonesia, pemain di pasar beton siap-pakai (RMC) di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, serta pemain nomor satu di pasar agregat

di Jabodetabek”, Indocement berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional perseroan. Penerapan prinsip GCG merupakan bagian dari upaya menciptakan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan membentuk komite, sistem, dan unit kerja, untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG dalam perseroan secara berkelanjutan.

6. Kalbe Farma Tbk (KLBF)

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi obat-obatan, suplemen kesehatan, dan produk nutrisi. Didirikan pada tahun 1966, Kalbe Farma telah berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan produk-produk unggulan seperti Decolgen, Kadu, dan Promag, yang telah menjadi merek terkenal di pasar. Selain itu, Kalbe juga aktif di sektor makanan dan minuman dengan produk seperti Entrasol dan Milna. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KLBF, PT Kalbe Farma Tbk berkomitmen untuk inovasi, kualitas, dan keberlanjutan dalam menyediakan produk-produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalbe juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang transparan dan akuntabel dalam seluruh aktivitas bisnisnya.

7. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)

PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) adalah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan manufaktur produk konsumen, termasuk produk kesehatan, kecantikan, dan makanan & minuman. Didirikan pada tahun 1953, Tempo Scan terkenal dengan berbagai merek terkemuka seperti Nasa, MyBaby, dan Vitalis, serta produk farmasi dan suplemen kesehatan seperti Enervon C. Selain itu, perusahaan ini juga aktif di sektor kosmetik dan perawatan kulit dengan merek-merek seperti Ovale. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TSPC, PT Tempo Scan Pacific Tbk berkomitmen untuk

memberikan produk berkualitas tinggi dengan inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan ini juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

8. Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi kemasan plastik sejak tahun 2001. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk berbasis polietilena berdensitas tinggi (HDPE) dan rendah (LLDPE/LDPE), seperti kantong kresek, kantong plastik dengan pegangan loop lembut, kantong plastik dengan tali serut, dan kantong plastik dengan pegangan patch, yang dikenal dengan merek “Dian”. Dengan pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk melayani pasar domestik maupun internasional. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT ESIP berkomitmen untuk menerapkan standar kualitas tinggi dalam produksinya serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.

9. Cahaya Kalbar Tbk (CEKA)

PT Cahaya Kalbar Tbk (CEKA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk-produk berbasis minyak kelapa sawit, seperti lemak kakao (*cocoa butter substitutes*), margarin, shortening, dan minyak kelapa sawit olahan. Berdiri sejak tahun 1968, CEKA fokus pada penyediaan bahan baku berkualitas tinggi untuk industri makanan, minuman, dan kosmetik. Produk-produk perusahaan banyak digunakan di pasar domestik maupun internasional, dengan reputasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan industri secara konsisten. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CEKA, PT Cahaya Kalbar Tbk berkomitmen terhadap inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan, serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasionalnya untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan.

10. Mayora Indonesia Tbk (MYOR)

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman dengan merek-merek terkenal seperti MariGold, Torabika, Biskuit Roma, dan Kapal Api. Didirikan pada tahun 1977, perusahaan ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia, dengan produk yang telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Mayora dikenal dengan inovasi produknya yang beragam, mulai dari biskuit, kopi, permen, hingga makanan instan. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MYOR, PT Mayora Indah Tbk terus memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional dengan komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang transparan dan akuntabel.

11. Arwana Citramulia Tbk (ARNA)

PT Arwana Citramulia Tbk adalah salah satu produsen keramik terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan merek dagang Arwana Ceramic Tiles. Didirikan pada tahun 1993, perusahaan ini berfokus pada produksi keramik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, yang ditujukan untuk segmen menengah ke bawah. Dengan lima pabrik yang tersebar di Indonesia, Arwana memiliki kapasitas produksi lebih dari 70 juta meter persegi keramik per tahun, menjadikannya salah satu pemasok utama di industri keramik nasional. Perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham ARNA dan dikenal atas kinerja keuangannya yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, PT Arwana Citramulia Tbk berkomitmen terhadap efisiensi produksi, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi produk. Perusahaan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan telah mendapatkan berbagai sertifikasi, seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu pilar utama, dengan struktur tata kelola yang transparan dan sistem pelaporan yang akuntabel. Melalui komitmen terhadap

kualitas, efisiensi, dan tanggung jawab sosial, Arwana terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen keramik paling kompetitif di Indonesia.

12. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Tbk (SIDO)

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk (SIDO) adalah perusahaan yang telah lama dikenal di Indonesia sebagai produsen jamu dan obat tradisional, serta produk kesehatan lainnya. Didirikan pada tahun 1951, SIDO dikenal luas dengan merek Sido Muncul, yang menawarkan berbagai produk jamu, suplemen kesehatan, dan minuman herbal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain jamu, perusahaan ini juga memproduksi produk kosmetik dan perawatan tubuh. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SIDO, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk berfokus pada inovasi produk, kualitas, dan keberlanjutan, sambil menjaga warisan tradisi pengobatan herbal Indonesia. SIDO juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh operasionalnya.

13. Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI)

PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi bahan baku industri, terutama tepung tapioka, sirup glukosa, dan produk-produk turunan pati lainnya. Didirikan pada tahun 1972, BUDI telah menjadi salah satu pemasok utama di industri tepung dan pemanis di Indonesia, menyediakan produk untuk berbagai sektor seperti makanan dan minuman, farmasi, dan industri lainnya. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUDI, PT Budi Starch & Sweetener Tbk terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan keberlanjutan. Perusahaan ini juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam setiap aspek operasionalnya.

14. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek utama CLEO. Berdiri pada tahun 2003, perusahaan ini menjadi salah satu pemasok di industri AMDK di Indonesia, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan berbagai varian kemasan yang sesuai untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri. CLEO dikenal dengan teknologi pemrosesan air yang modern dan ramah lingkungan, memastikan produk yang higienis dan aman untuk dikonsumsi. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CLEO, PT Sariguna Primatirta Tbk terus memperluas jaringan distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia, dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasionalnya.

15. Astra International Tbk (ASII)

PT Astra International Tbk (ASII) adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor industri, termasuk otomotif, alat berat, agribisnis, keuangan, infrastruktur, dan teknologi. Didirikan pada tahun 1957, perusahaan ini terkenal dengan berbagai merek terkemuka seperti Toyota, Isuzu, Honda, dan Daihatsu di sektor otomotif, serta memiliki portofolio yang luas di sektor lainnya. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII, Astra International memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia dan internasional. Astra berkomitmen pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap lini bisnisnya. Dengan berbagai divisi yang saling mendukung, Astra International terus menjadi pemimpin pasar yang inovatif dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai data yang dapat dilihat dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk menganalisis statistik deskriptif yakni *views* 9.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kompensasi Eksekutif
Mean	0.200248	0.604127	0.431111	3.080000	25.65420
Median	0.209696	0.578478	0.428571	3.000000	25.36646
Maximum	0.254415	0.920119	0.666667	4.000000	29.30737
Minimum	0.052430	0.085043	0.166667	3.000000	19.72328
Std. Dev.	0.038096	0.200071	0.091682	0.273120	2.453458
Skewness	-1.537219	-0.630109	-0.019639	3.096281	-0.429763
Kurtosis	5.895499	3.403480	2.790737	10.58696	2.734374
Jarque-Bera Probability	55.73777	5.471702	0.141668	299.7179	2.529198
	0.000000	0.064839	0.931616	0.000000	0.282352
Sum	15.01862	45.30951	32.33333	231.0000	1924.065
Sum Sq. Dev.	0.107395	2.962114	0.622011	5.520000	445.4399
Observations	75	75	75	75	75

Sumber: Output *Views* 9, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan hasil statistik deskriptif pada penelitian. Berdasarkan data diketahui bahwa *observations* atau jumlah data pada setiap variabel sebanyak 75, dengan variabel independen berjumlah 4 yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif dan 1 variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel penghindaran pajak diketahui nilai *mean* yang diperoleh sebesar 0.200248 dan nilai standar deviasi variabel penghindaran pajak sebesar 0.038096. Perusahaan dengan penghindaran pajak (ETR) terkecil adalah PT Budi Starch & Sweetener Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.052430. Perusahaan dengan penghindaran pajak (ETR) terbesar pada tahun 2019 adalah PT Arwana Citramulia Tbk yaitu sebesar 0.254415.

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel kepemilikan institusional diketahui nilai *mean* yang diperoleh sebesar 0.604127 dan nilai standar deviasi sebesar 0.200071. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terkecil adalah PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.085043. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terbesar adalah PT Cahaya Kalbar Tbk pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 0.920119.

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel dewan komisaris independen memiliki nilai *mean* sebesar 0.431111 dan nilai standar deviasi sebesar 0.091682. Perusahaan dengan dewan komisaris independen terkecil adalah PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.166667. Perusahaan dengan dewan komisaris independen terbesar adalah PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.666667.

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel komite audit diketahui nilai *mean* yang diperoleh sebesar 3.080000 dan standar deviasi diperoleh sebesar 0.273120. Perusahaan dengan komite audit sebesar 3.000000 adalah PT Selamat Sempurna Tbk, PT Indocement Tungal Prakasa Tbk, PT Tempo Scan Pacific Tbk, PT Cahaya Kalbar Tbk, PT Mayora Indonesia Tbk, PT Arwana Citramulia Tbk, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Tbk, PT Budi Starch & Sweetener Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Siantar Top Tbk,

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Perusahaan dengan komite audit terbesar adalah PT Astra Internasional Tbk yaitu sebesar 4.000000

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel kompensasi eksekutif diketahui nilai *mean* yang diperoleh 25.65420 dan standar deviasi variabel kompensasi eksekutif sebesar 2.453458. Perusahaan dengan kompensasi terkecil adalah PT Sinergi Inti Plasindo Tbk pada tahun 2019 yaitu sebesar 19.7232 (Rp.367.885.000) Perusahaan dengan kompensasi terbesar adalah PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2021 yaitu sebesar 29.30737 (Rp. 5.346.000.000).

4.2.2 Model Estimasi Data Panel

4.2.2.1 Common Effect Model

Berikut hasil estimasi data panel Common Effect Model dengan menggunakan Eview:

Tabel 4.4 Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037761	0.067889	-0.556221	0.5798
Kepemilikan Institusional	0.032136	0.019927	1.612692	0.1113
Dewan Komisaris Independen	0.102578	0.044974	2.280856	0.0256
Komite Audit	-0.006652	0.015026	-0.442668	0.6594
Kompensasi Eksekutif	0.007596	0.001633	4.651908	0.0000
R-squared	0.270407	Mean dependent var		0.200248
Adjusted R-squared	0.228716	S.D. dependent var		0.038096
S.E. of regression	0.033457	Akaike info criterion		-3.892786
Sum squared resid	0.078355	Schwarz criterion		-3.738287
Log likelihood	150.9795	Hannan-Quinn criter.		-3.831096
F-statistic	6.485976	Durbin-Watson stat		1.252570
Prob(F-statistic)	0.000169			

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Teknik Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel paling sederhana, hanya terdiri dari gabungan data time series dan cross

section sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu).

4.2.2.2 Fixed Effect Model

Berikut hasil estimasi data panel Fixed Effect Model dengan menggunakan evIEWS:

Tabel 4.5 Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232667	0.304827	0.763273	0.4485
Kepemilikan Institusional	0.024346	0.047912	0.508126	0.6134
Dewan Komisaris Independen	0.056353	0.069725	0.808212	0.4224
Komite_Audit	-0.004316	0.032609	-0.132365	0.8952
Kompensasi Eksekutif	-0.002266	0.010901	-0.207844	0.8361
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.582828	Mean dependent var		0.200248
Adjusted R-squared	0.448737	S.D. dependent var		0.038096
S.E. of regression	0.028285	Akaike info criterion		-4.078440
Sum squared resid	0.044802	Schwarz criterion		-3.491343
Log likelihood	171.9415	Hannan-Quinn criter.		-3.844019
F-statistic	4.346504	Durbin-Watson stat		2.165689
Prob(F-statistic)	0.000012			

Sumber: Output EvIEWS 9, diolah 2025

Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang digunakan ketika terdapat efek individual yang tidak teramati namun tetap konstan sepanjang waktu untuk setiap unit observasi.

4.2.2.3 Random Effect Model

Berikut hasil estimasi data panel Random Effect Model dengan menggunakan evIEWS:

Tabel 4.6 Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014753	0.097490	-0.151328	0.8802
Kepemilikan Institusional	0.032125	0.028258	1.136870	0.2595
Dewan Komisaris Independen	0.079563	0.052747	1.508390	0.1360
Komite_Audit	-0.006198	0.020667	-0.299892	0.7651
Kompensasi Eksekutif	0.007031	0.002678	2.625903	0.0106
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.021972	0.3763
Idiosyncratic random			0.028285	0.6237
Weighted Statistics				
R-squared	0.115912	Mean dependent var		0.099909
Adjusted R-squared	0.065393	S.D. dependent var		0.028666
S.E. of regression	0.027713	Sum squared resid		0.053762
F-statistic	2.294416	Durbin-Watson stat		1.824509
Prob(F-statistic)	0.067799			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.266572	Mean dependent var		0.200248
Sum squared resid	0.078767	Durbin-Watson stat		1.245316

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Random effect model mengasumsikan bahwa perbedaan individual adalah acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independent dalam model. Dalam random effect model, efek individual dianggap sebagai komponen acak dalam eror term yang dapat membantu dalam mengurangi kemungkinan bias dalam estimasi, terutama saat perbedaan antara unit observasi diyakini tidak bersifat tetap.

4.2.3 Penentuan Regresi Data Panel

4.2.3.1 Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, diantara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect model (FEM). Dengan dasar pengambilan keputusan uji chow

jika nilai probability $F < 0,05$ maka model yang terpilih FEM, dan sebaliknya jika nilai probability $F > 0.05$ maka model yang terpilih CEM.

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.995602	(14,56)	0.0018
Cross-section Chi-square	41.924051	14	0.0001

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Pada Tabel 4.7 hasil uji chow diatas menyatakan bahwa nilai probability F sebesar 0.0018 maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) karena nilai probability F ($0.0018 < 0.05$).

4.2.3.2 Hasil Uji Hausman

Uji hausman dilakukan setelah uji chow, tujuannya untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, apakah Random Effect model (REM) lebih baik dari Fixed Effect Model (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan jika probability cross section random > 0.05 maka model yang terpilih adalah REM dan sebaliknya jika nilai probability cross section random < 0.05 maka model yang terpilih adalah FEM.

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.199040	4	0.8783

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Pada tabel 4.8 hasil uji hausman diatas diketahui bahwa nilai probability cross section random sebesar 0.8783 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa model terpilih yaitu Random Effect Model (REM) karena nilai probability sebesar ($0.8783 > 0.05$).

4.2.3.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier dilakukan setelah uji hausman, yang bertujuan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, apakah Common Effect Model (CEM) lebih baik dari Random Effect Model (REM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan uji lagrange multiplier yaitu jika nilai Breusch-Pagan cross section > 0.05 maka model yang terpilih adalah CEM, sebaliknya jika Breusch-Pagan cross section < 0.05 maka model yang terpilih adalah REM.

Tabel 4.9 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	10.77618 (0.0010)	1.351837 (0.2450)	12.12802 (0.0005)
Honda	3.282709 (0.0005)	1.162685 (0.1225)	3.143369 (0.0008)
King-Wu	3.282709 (0.0005)	1.162685 (0.1225)	2.572876 (0.0050)
Standardized Honda	4.466639 (0.0000)	1.498871 (0.0670)	0.573352 (0.2832)
Standardized King-Wu	4.466639 (0.0000)	1.498871 (0.0670)	0.268450 (0.3942)
Gourierioux, et al.*	--	--	12.12802 (< 0.01)

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

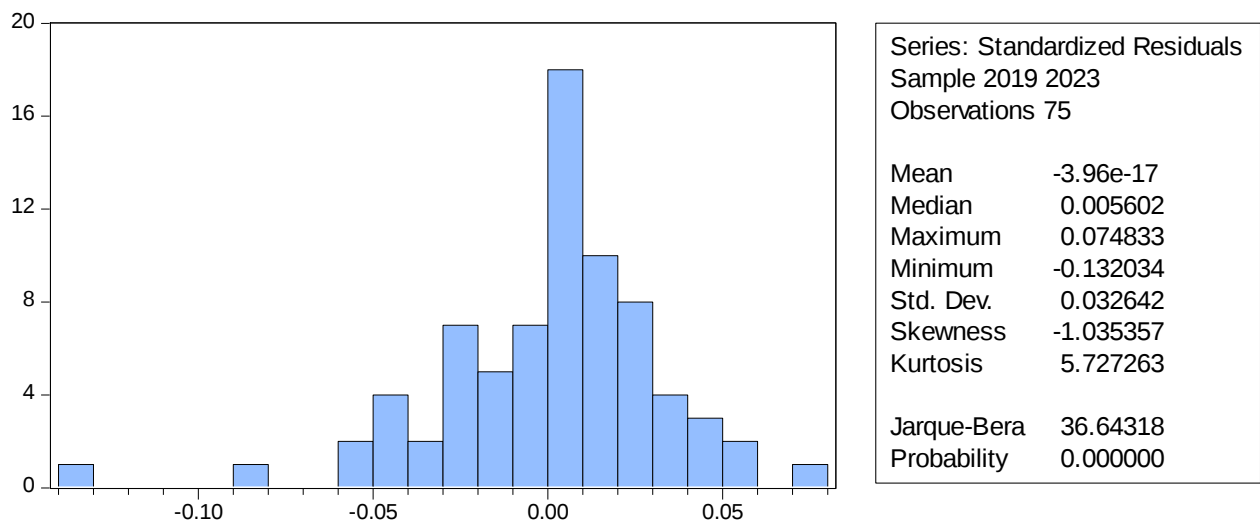
Pada Tabel 4.9 hasil uji lagrange multiplier menunjukkan nilai probability cross section sebesar 0.0010 maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM) karena nilai probability cross section sebesar $(0.0010 < 0.05)$.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah metode yang dilakukan bertujuan untuk menentukan apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Jarque-Berra yang mana hasilnya dapat dilihat dari nilai probability Jarque-Berra > dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka dapat dianggap data berdistribusi normal.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Pada tabel 4.10 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probability Jarque-Berra menunjukkan nilai 0.000000 yang berarti < 0.05 . Nilai ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data terdistribusi tidak normal. Menurut teorema limit pusat, untuk ukuran sampel yang besar (lebih dari 30 atau 40) maka dapat diartikan distribusi sampling cenderung normal meskipun residual data tidak berdistribusi normal, maka asumsi normalitas

tidak menimbulkan masalah yang besar dan penelitian masih bisa dilanjutkan.⁹⁰

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi dinilai mengandung multikolinearitas apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independent atau terdapat hubungan linier. Dengan dasar pengambilan keputusan jika koefisien korelasi menunjukkan lebih besar dari > 0.8 maka dinyatakan bahwa terdapat multikolinearitas pada model dan sebaliknya jika < 0.8 maka dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data dalam regresi.

4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kompensasi Eksekutif
Kepemilikan Institusional	1.000000	-0.182067	-0.066550	-0.037786
Dewan Komisaris Independen	-0.182067	1.000000	-0.244652	-0.149374
Komite Audit	-0.066550	-0.244652	1.000000	0.212891
Kompensasi Eksekutif	-0.037786	-0.149374	0.212891	1.000000

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji multikolinearitas memperlihatkan nilai korelasi < 0.8 . Berarti tidak terjadi korelasi antara variabel independen, sehingga disimpulkan bahwa model tidak mengandung unsur multikolinearitas.⁹¹

⁹⁰ Ghasemi and Zahediasl, "Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians."

⁹¹ A Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, Dan SMARTPLS* (Unit Penerbit & PERC STIM YKPN, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=EP3YzwEACAAJ>.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki ketidak samaan varian dari satu residual pengamatan kepengamatan lainnya dengan absout residual > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.087052	0.062309	1.397103	0.1668
Kepemilikan Institusional	-0.011509	0.018111	-0.635463	0.5272
Dewan Komisaris Independen	-0.022701	0.034157	-0.664614	0.5085
Komite Audit	0.001960	0.013274	0.147670	0.8830
Kompensasi_Eksekutif	-0.002037	0.001697	-1.200085	0.2342

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai absout residual > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.5 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk menentukan seberapa banyak variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan dasar koefisien determinan (R^2) mendekati 1 maka model memiliki kemampuan prediktif yang baik dan variabel independen sangat relevan untuk menjelaskan variabel dependen. Dan sebaliknya jika koefisien determinan (R^2) mendekati 0 maka variabel independen kurang relevan untuk menjelaskan variabel dependen.

4.13 Hasil Uji Koefisien Determinan

R-squared	0.115912	Mean dependent var	0.099909
Adjusted R-squared	0.065393	S.D. dependent var	0.028666
S.E. of regression	0.027713	Sum squared resid	0.053762
F-statistic	2.294416	Durbin-Watson stat	1.824509
Prob(F-statistic)	0.067799		

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Dari tabel 4.13 hasil uji koefisien determinan menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinan sebesar 0.065393 ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan sekitar 6.54% dari total variabilitas variabel dependen. Dengan demikian terdapat 93.46% variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model, sehingga dapat dikatakan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dianggap terbatas.

4.2.6 Uji Regresi Data Panel

Setelah model yang digunakan dalam penelitian ini telah diketahui yaitu Random Effect Model (REM), kemudian uji regresi data panel yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Data Panel REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014753	0.097490	-0.151328	0.8802
Kepemilikan Institusional	0.032125	0.028258	1.136870	0.2595
Dewan Komisaris Independen	0.079563	0.052747	1.508390	0.1360
Komite_Audit	-0.006198	0.020667	-0.299892	0.7651
Kompensasi Eksekutif	0.007031	0.002678	2.625903	0.0106

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh sebelumnya dengan menggunakan Random Effect Model, maka dinyatakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = - 0.014753 + 0.032125 X_1 + 0.079563 X_2 - 0.006198 X_3 + 0.007031 X_4$$

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, maka hasil uji regresi data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat nilai koefisien regresi (Y) sebesar -0.014753. Hasil ini menyatakan bahwa bila semua variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) = 0 maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0.014753.
- b. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X_1) sebesar 0.032125. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai kepemilikan institusional mengalami kenaikan senilai 1%, maka akan meningkatkan penghindaran pajak senilai 0.032125% dengan kondisi variabel independen lainnya dianggap tetap.
- c. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen (X_2) sebesar 0.079563. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan penghindaran pajak senilai 0.079563% dengan kondisi variabel independen lainnya dianggap tetap.
- d. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat nilai koefisien regresi variabel komite audit (X_3) sebesar -0.006198. Hasil ini menunjukkan bahwa jika komite audit meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan penghindaran pajak senilai 0.006198 dengan kondisi variabel independen lainnya dianggap tetap.
- e. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat nilai koefisien regresi kompensasi eksekutif (X_4) sebesar 0.007031. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai kompensasi eksekutif mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan penghindaran pajak senilai 0.007031 dengan kondisi variabel independen lainnya dianggap tetap.

4.2.7 Uji Hipotesis

4.2.7.1 Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- Jika probability $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika probability $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014753	0.097490	-0.151328	0.8802
Kepemilikan Institusional	0.032125	0.028258	1.136870	0.2595
Dewan Komisaris Independen	0.079563	0.052747	1.508390	0.1360
Komite Audit	-0.006198	0.020667	-0.299892	0.7651
Kompensasi_Eksekutif	0.007031	0.002678	2.625903	0.0106

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Berdasarkan pada tabel 4.15 hasil uji t diketahui bahwa masing-masing variabel independen dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional (X_1)

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan t-statistic untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 1.136870 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.032125 dan nilai probability sebesar $0.2595 > 0.05$. Oleh karena itu maka disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

2. Dewan komisaris independen (X_2)

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan t-statistic untuk variabel dewan komisaris independen sebesar 1.508390 dengan nilai

koefisien regresi sebesar 0.079563 dan nilai probability sebesar $0.1360 > 0.05$. Oleh karena itu maka disimpulkan dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

3. Komite audit (X_3)

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan t-statistic untuk variabel komite audit sebesar -0.299892 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.006198 dan nilai probability sebesar $0.7651 > 0.05$. Oleh karena itu maka disimpulkan komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

4. Kompensasi eksekutif (X_4)

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan t-statistic untuk variabel kompensasi eksekutif sebesar 2.625903 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.007031 dan nilai probability sebesar $0.0106 < 0.05$. Oleh karena itu maka disimpulkan kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

4.2.7.2 Uji F (Simultan)

Uji f adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- a) Jika probability $F > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability $F < 0,05$ maka H_1 diterima yang artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16 Hasil Uji F

R-squared	0.115912	Mean dependent var	0.099909
Adjusted R-squared	0.065393	S.D. dependent var	0.028666
S.E. of regression	0.027713	Sum squared resid	0.053762
F-statistic	2.294416	Durbin-Watson stat	1.824509
Prob(F-statistic)	0.067799		

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji f menunjukkan bahwa nilai probability F statistik senilai $0.067799 > 0.05$. Maka bisa disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0.032125 dengan t-statistic sebesar 1.136870 dan probability sebesar 0.2595. Berdasarkan hasil yang ada, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Karena nilai probabilitly yang lebih besar dari 0.05 ($0.2595 > 0.05$) mengindikasikan bahwa hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak tidak dapat dianggap signifikan secara statistik.

Jadi kepemilikan institusional yang tinggi ataupun rendah tidak dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Jika ditinjau dari teori agensi, pemilik perusahaan (prinsipal) mengharapkan manajemen (agen) dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, namun kenyataannya manajemen sering kali lebih mengutamakan

kepentingan pribadinya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan praktik penghindaran pajak. Disinilah peran kepemilikan institusional secara teoritis berfungsi untuk mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum tentu dilaksanakan dengan baik.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dibuktikan pada sampel PT Unilever Indonesia Tbk yang memiliki proporsi kepemilikan institusional terendah yaitu sebesar 9% memiliki nilai ETR sebesar 25% pada tahun 2019. Sedangkan PT Tempo Scan Pacific Tbk yang memiliki proporsi kepemilikan institusional tinggi yaitu sebesar 80% memiliki nilai ETR yang sama pada tahun yang sama yaitu 2019 sebesar 25%. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kepemilikan institusional yang berperan sebagai mekanisme untuk mengontrol manajemen dalam praktik penghindaran pajak belum tentu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kepemilikan institusional tidak memiliki peran dalam mendisiplinkan, mempengaruhi, dan mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga kecil atau besarnya kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi strategi perpajakan dalam sebuah perusahaan.⁹² Serta keputusan pendiri perusahaan yang lebih mendominasi dalam menentukan kebijakan perusahaan menyebabkan kecil atau besarnya proporsi kepemilikan institusional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan

⁹² Sari et al., "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018."

oleh manajemen perusahaan.⁹³ Perusahaan yang taat akan peraturan pajak tidak menimbang proporsi kepemilikan institusional, perusahaan lebih fokus pada berapa besaran pajak yang harus dibayarkan karena penghindaran pajak yang dilakukan dapat mencoreng nama baik perusahaan, maka dari itu penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes dan Hayu (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Heni dan Evi (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mungkin bukan faktor yang cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar 0.079563, dengan t-statistic sebesar 1.508390 dan probability sebesar 0.1360. Berdasarkan hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Karena nilai probabilitiy yang lebih besar dari 0.05 ($0.1360 > 0.05$) mengindikasikan bahwa hubungan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak tidak dapat dianggap signifikan secara statistik.

Berdasarkan teori agensi, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dewan komisaris

⁹³ Putriyanti and Maria, “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi.”

independen tidak memiliki hubungan pribadi ataupun finansial dengan perusahaan, sehingga semestinya dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi perusahaan secara objektif dan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Namun, dalam kenyataan keberadaan dewan komisaris independen tidak selalu efektif dalam membatasi praktik penghindaran pajak, terutama jika pengawasan yang dijalankan hanya bersifat substantif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam upaya memperkecil praktik penghindaran pajak karena keberadaan dewan komisaris independen dianggap hanya sebagai syarat untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.⁹⁴ Dewan komisaris independen juga tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, sehingga dewan komisaris tidak mengetahui dan memantau segala strategi perpajakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan.⁹⁵ Dewan komisaris independen juga tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam memutuskan sebuah tindakan, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa dewan komisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dibuktikan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang memiliki dewan komisaris independen terendah yaitu sebesar 17% memiliki nilai ETR sebesar 22% pada tahun 2020, sedangkan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk yang memiliki dewan komisaris independen tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 50% juga memiliki nilai ETR yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 22%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, disimpulkan bahwa

⁹⁴ Hilmi et al., "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017."

⁹⁵ Martin and Indrati, "Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak."

hipotesis kedua yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwan dkk (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Boyke dan Menik (2024) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen bukan faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak di sebuah perusahaan.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -0.006198, dengan t-statistic sebesar -0.299892 dan probability sebesar 0.7651. Berdasarkan hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Karena nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05 ($0.7651 > 0.05$) mengindikasikan bahwa hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak tidak dapat dianggap signifikan secara statistik.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dibuktikan pada PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk yang memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang pada tahun 2023 memiliki nilai ETR sebesar 19%, sedangkan pada PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2023 memiliki jumlah komite audit sebanyak 4 orang juga memiliki nilai ETR sebesar 19%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, diketahui bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa komite audit lebih fokus pada pengawasan internal keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan bukan spesifik pada masalah penghindaran pajak.⁹⁶ Karena komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengaudit dan memastikan laporan keuangan disampaikan secara baik dan komite audit hanya bertindak sebagai badan yang memantau tanpa memiliki wewenang langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut teori agensi, komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dibentuk untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Komite audit dibentuk untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang seharusnya, serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, termasuk peraturan perpajakan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang perlu diingat bahwa komite audit tetap memiliki peran penting dalam pengawasan perusahaan. Komite audit tetap memiliki peran penting dalam memastikan integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri dan G Anggana (2023) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ilma dkk (2023) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

⁹⁶ Indri Dwi Rahmawati and G Anggana Lisiantara, "Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 259–66, www.ortax.org.

4.3.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar 0.007031, dengan t-statistic sebesar 2.625903 dan probability sebesar 0.0106. Berdasarkan hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 ($0.0106 < 0.05$) mengindikasikan bahwa hubungan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dapat dianggap signifikan secara statistik.

Kompensasi eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan kepada pihak eksekutif dapat berupa materi ataupun non materi agar mereka termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika dijelaskan menggunakan teori agensi, keterkaitan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen), pemberian kompensasi eksekutif bertujuan untuk mengatasi tantangan yang akan muncul, yaitu ketidak sinkronan kepentingan kedua belah pihak, dengan adanya kompensasi eksekutif ini diharapkan akan terwujudnya keselarasan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dibuktikan pada PT Sinergi Inti Plastindo Tbk pada tahun 2021 memiliki kompensasi yaitu sebesar Rp. 529.320.000 dengan nilai ETR sebesar 24%, berbanding dengan PT Sariguna Primatirta Tbk pada tahun 2020 yang memiliki kompensasi Rp. 17.070.000.000 memiliki nilai ETR sebesar 17%. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi eksekutif, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak sebagai upaya memaksimalkan laba perusahaan. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

Berdasarkan hasil penelitian koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi eksekutif, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa eksekutif yang mendapatkan keuntungan tinggi dari perusahaan akan bersedia untuk membuat keputusan yang dapat meminimalkan pajak. Kompensasi eksekutif cenderung dikaitkan dengan insentif untuk meningkatkan kinerja eksekutif agar lebih optimal serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dengan melakukan efisiensi pajak.⁹⁷ Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desri dan Nofryanti (2023) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Anggita dkk (2024) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di sebuah perusahaan.

⁹⁷ Cahyani, Indarti, and Widiatmoko, "Pengaruh Komite Audit, Karakter Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil uji t probability sebesar $0.2595 > 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.32125. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil uji t probability sebesar $0.1360 > 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.079563. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil uji t probability sebesar $0.7651 > 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0.006198. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil uji t probability sebesar $0.0106 < 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.007031. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

5.2 Saran

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga segala masukan dan saran yang bertujuan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik kedepannya sangat diperlukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas cakupan penelitiannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak, dan juga dapat memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk perusahaan diharapkan dapat memperkuat praktik tata kelola perusahaan, terutama dalam merancang kompensasi yang efektif dan tetap dalam batas kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
3. Untuk investor disarankan agar memperhatikan faktor tata kelola perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Karena perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki risiko yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nanda Yoga, Elsa Saphira Evani, and Siti Maghfiroh. "Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda." *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* 2, no. 2 (2023): 102–10. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>.
- Afrika, Rizki. "Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2021): 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>.
- Agriyanto, Ratno, Azizah Setiyawati, and Dessy Noor Farida. "The Effect of Good Corporate Governance, Free Cash Flow, and Tax Planning on Earnings Management." *At-Taqqaddum* 13, no. 1 (2021): 1–20.
- Antari Yuliana, Novi, Tutty Nuryati, Elia Rossa, and Nera Marinda Machdar. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>.
- Aqilla Athaya, and Ersi Sisdiyanto. "Strategi Penghindaran Pajak Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak Analisis Kasus Pada Industri Multinasional." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2024): 7–17.
- Arif, Muhammad Sulton, and Mohamad Djasuli. "'Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al- Qur ' an)". " *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial ,E-ISSN: 2747-0938* " 2, no. 2 (2022): 207–18.
- Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>.
- Asvianty, Mia Ade, Mukhammad Kharis Wildan Laksono, and Mohamad Djasuli. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Bidang Perindustrian Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 929–32. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i3.351>.
- bika juwarno, rina trisnawati. "Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Family Ownership Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak" 10, no. 2 (2019): 71–76.
- Cahyani, Anggita Putri, M. G. Kentris Indarti, and Jacobus Widiatmoko. "Pengaruh Komite Audit, Karakter Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 9101–13. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8981>.
- Coleman, Bernard D., and Raymond M. Fuoss. "Quaternization Kinetics. I. Some Pyridine Derivatives in Tetramethylene Sulfone." *Journal of the American Chemical Society* 77, no. 21 (1955): 5472–76. <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>.
- Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia, 2021.

- Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)." *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2021): 705–19. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147>.
- Hasanah, Uswatun, and Nyimas Wardatul Afiqoh. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2023): 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>.
- Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.
- Hendi, Hendi, and Dea Fanny. "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 1044–58. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>.
- Hidayat, Wastam Wahyu. "The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 1 (2018): 19–26.
- Hilmi, Marwan Faiz, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, and Susi Setiawati. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017." *Owner* 6, no. 4 (2022): 3533–40. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>.
- Hudha, Bill, and Dwi Cahyo Utomo. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)." *Diponegoro Journal of Accounting* 10, no. 2018 (2021): 2337–3806.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Direktorat Jenderal Pajak." *Pedoman Penagihan Pajak*, 2009.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Kemenkeu perubahan*, no. 235 (2007): 245.
- Iqbal, Muhammad. "Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis "." *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, no. 2 (2015): 7.
- Jaya, I Gede Nyoman Mindra, and Neneng Sunengsih. "Kajian Analisis Regresi Dengan Data Panel." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 2009, 51–58. https://eprints.uny.ac.id/12187/1/M_Stat_6_GEDE_NYOMAN.pdf.
- KEP-643/BL/2012, Nomor: "Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan" 2004 (2012).
- Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi." *Ekonomika-Bisnis* 02 (02) (2010): 357–70. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694/pdf>.
- Kusumaningtyas, Metta, and Dessy Noor Farida. "Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba," 2016. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:168778090>.

- MARDIATMOKO, GUN -. “Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda.” *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (2020): 333–42. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- Marietza, Fenny, and Indah Oktari Wijayanti. “Pengaruh Pandangan Investasi Investor Institusional Terhadap Kredit Rating Perusahaan.” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2021): 293–303. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30256>.
- Martias, Lilih Deva. “Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi.” *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 16, no. 1 (2021): 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>.
- Martin, Boyke, and Menik Indrati. “Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jesya* 7, no. 2 (2024): 1445–1557. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>.
- Masturi, Hasanawi, Asyrafinafilah Hasanawi, and Adib Hasanawi. “Jurnal Inovasi Penelitian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 1–208.
- McColgan, Patrick. “Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature from a UK Perspective.” *Department of Accounting & Finance, University of Strathclyde, Glasgow*, 2001.
- Miladiasari, Miladiasari, Ratno Agriyanto, Dessy Farida, Ari Prasetyoningrum, and Muhlis Muhlis. “The Effect of Environmental Performance and Environmental Cost on Financial Performance with Good Corporate Governance as the Moderating Variable,” no. 32 (2021). <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303857>.
- Munandar, Aris. “Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara “Negara Asia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 1 (2017): 59–67. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v8i1.246>.
- Nima, Irsil Meilani, Nurlatifah Assmaningrum, Exca Sukas Jody, Alya Nurhandayani, and Dewi Atriani. “Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>.
- Noorica, Famela, and Ardan Gani Asalam. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance.” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 2021.
- Noviyani, Rimah, and Prisila Damayanty. “The Effect Of Good Corporate Governance, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024): 2433–43.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Kompensasi Kerja Dalam Islam.” *Jurnal Muamalah* V, no. 2 (2015): 120–28.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik,” 2014. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-->

- Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf.
- P.D Wida, Ni Putu, and I Wayan Suartana. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan." *E-JurnalAkuntansi Universitas Udayana* 9, no. 3 (2014): 575–90. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9317>.
- Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, and Audita Setiawan. "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Purnawan, Amin. "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.260>.
- Putri, Adriyanti Agustina, and Nadia Fathurrahmi Lawita. "Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* Vol. 22, no. 1 (2020): No. 1: 1-11.
- Putriyanti, Heni, and Evi Maria. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 15, no. 1 (2022): 149–58. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.581>.
- Rahmawati, Indri Dwi, and G Anggana Lisiantara. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 259–66. www.ortax.org.
- Rombbunga, Meyjerd. "Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak." *Perspektif Akuntansi* 2, no. 3 (2019): 249–67. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>.
- Sa'diah, Fatimah, and Mayar Afriyenti. "Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Transfer Pricing." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 3 (2021): 501–16. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>.
- Salsabila, Sania, and Mukti Raya Dewi. "Analisis Harga Saham Pada Sektor Kesehatan Menggunakan Regresi Data Panel." *Jurnal Riset Dan Aplikasi Matematika* 06, no. 02 (2022): 117–28. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jram/article/view/18727>.
- Salsalina Lingga Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-UnivKristen Maranatha, Ita. "Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Zenit* 1, no. 3 (2012): 210–21.
- Sari, Agnes Yunita, Hayu Wikan Kinasih, Dimas Aditya, Ni Putu Devi Pratiwi¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra², and I Made Sudiartana³. "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2021): 1609–17.

- Satria, M Rizal. "Peran Teori Agensi Dalam Issue Bidang Akuntansi." *Land Journal* 3, no. 2 (2022): 125–38.
- Sholihah, Siti Mar'atush, Nanda Yoga Aditiya, Elsa Saphira Evani, and Siti Maghfiroh. "Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda." *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* 2, no. 2 (2023): 102–10.
- Sidabutar, Bunga Citra, Pelinta Tarigan, and Ganda Siahaan. "Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)" 1, no. 1 (2020): 51–66.
- Sumekar, Diah Ratna, Sri Mulyani, and Siti Nuridah. "Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4533–41. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Tahitu, Amelia, Alex Robert Tutuhatunewa, and Vina Maria Fadirubun. "Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Gaya Kepemimpinan Lurah Milenial Di Kota Ambon." *Jurnal BADATI* 6, no. 1 (2024): 53–72.
- Triuwono, Edwin. "Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)." *Available at SSRN 3250329*, 2018.
- Warno, Warno, and Ulul Fahmi. "Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45." *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 188–201. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9225>.
- Widarjono, A. *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, Dan SMARTPLS*. Unit Penerbit & PERC STIM YKPN, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=EP3YzwEACAAJ>.
- Wildan, Muhammad. "Bikin Faktur Fiktif Hingga Rp.21,46 Miliar, Direktur PT Jadi Tersangka." *DDTC News*, 2024. <https://search.app/QEEuuDrhRgKrmxZi6>.
- Wulandari, Fitri, Masripah Masripah, and Ni Putu Eka Widyastuti. "Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1:569–86, 2020.
- Zef Arfiansyah, S E, and M Acc Fin. "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 4, no. 2 (2020): 67–76.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Penelitian

Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum pajak	ETR
INTP	2019	439,122,000,000	2,274,427,000,000	0.193069
	2020	341,991,000,000	2,148,328,000,000	0.159189
	2021	445,506,000,000	2,234,002,000,000	0.199421
	2022	446,875,000,000	2,289,309,000,000	0.195201
	2023	446,082,000,000	2,396,348,000,000	0.186151
ARNA	2019	74,189,171,801	291,607,365,374	0.254415
	2020	91,110,069,840	420,626,406,830	0.216606
	2021	137,397,922,106	609,653,614,511	0.225370
	2022	163,745,978,975	746,096,093,997	0.219470
	2023	127,801,212,150	575,667,695,985	0.222005
SMSM	2019	183,366,000,000	822,042,000,000	0.223062
	2020	145,152,000,000	684,268,000,000	0.212127
	2021	193,905,000,000	922,168,000,000	0.210271
	2022	236,058,000,000	1,172,002,000,000	0.201414
	2023	236,002,000,000	1,299,536,000,000	0.181605
CEKA	2019	66,114,282,224	285,132,249,695	0.231872
	2020	45,117,566,179	232,864,791,126	0.193750
	2021	48,009,595,868	236,334,817,214	0.203142
	2022	59,718,850,394	283,149,105,983	0.210910
	2023	40,493,104,343	195,807,621,110	0.206800
CLEO	2019	34,162,803,000	172,342,839,552	0.198226
	2020	28,847,901,940	168,813,556,985	0.170886
	2021	41,811,775,720	229,981,620,687	0.181805
	2022	47,884,818,300	250,491,391,647	0.191164
	2023	79,485,178,300	412,208,114,325	0.192828
MYOR	2019	673,306,449,500	2,704,466,581,011	0.248961
	2020	576,418,381,880	2,683,890,279,936	0.214770
	2021	296,373,748,136	1,549,648,556,686	0.191252
	2022	521,483,045,980	2,506,057,517,934	0.208089
	2023	872,973,436,829	4,093,715,832,812	0.213247
KLBF	2019	865,015,000,888	3,402,616,824,533	0.254221

	2020	828,010,058,930	3,627,632,574,744	0.228251
	2021	911,256,951,493	4,143,264,634,774	0.219937
	2022	1,008,813,493,059	4,458,896,905,350	0.226247
	2023	827,832,384,309	3,606,237,203,810	0.229556
SIDO	2019	266,146,000,000	1,073,835,000,000	0.247846
	2020	265,532,000,000	1,199,548,000,000	0.221360
	2021	352,333,000,000	1,613,231,000,000	0.218402
	2022	315,138,000,000	1,419,852,000,000	0.221951
	2023	268,891,000,000	1,219,539,000,000	0.220486
TSPC	2019	201,065,998,598	796,220,911,472	0.252525
	2020	230,078,783,192	1,064,448,534,874	0.216148
	2021	220,552,779,828	1,098,370,417,471	0.200800
	2022	292,295,089,045	1,329,822,971,089	0.219800
	2023	352,916,243,912	1,603,172,641,969	0.220136
UNVR	2019	2,508,935,000,000	9,901,772,000,000	0.253382
	2020	2,043,333,000,000	9,206,869,000,000	0.221936
	2021	1,738,444,000,000	7,496,592,000,000	0.231898
	2022	1,629,042,000,000	6,993,803,000,000	0.232926
	2023	1,400,936,000,000	6,201,876,000,000	0.225889
BUDI	2019	8,205,000,000	83,905,000,000	0.097789
	2020	3,634,000,000	69,312,000,000	0.052430
	2021	17,669,000,000	113,965,000,000	0.155039
	2022	20,684,000,000	116,031,000,000	0.178263
	2023	27,480,000,000	127,311,000,000	0.215849
ASII	2019	7,433,000,000,000	34,054,000,000,000	0.218271
	2020	3,170,000,000,000	21,741,000,000,000	0.145807
	2021	6,764,000,000,000	32,350,000,000,000	0.209088
	2022	9,970,000,000,000	50,390,000,000,000	0.197857
	2023	10,228,000,000,000	54,729,000,000,000	0.186884
CPIN	2019	966,415,000,000	4,608,641,000,000	0.209696
	2020	921,865,000,000	4,767,698,000,000	0.193356
	2021	1,014,536,000,000	4,633,546,000,000	0.218955
	2022	606,823,000,000	3,537,180,000,000	0.171556
	2023	678,797,000,000	2,996,885,000,000	0.226501
ESIP	2019	174,326,175	1,392,793,833	0.125163
	2020	226,279,388	2,055,207,215	0.110101
	2021	194,838,380	811,337,127	0.240145
	2022	125,313,540	1,246,296,066	0.100549

	2023	118,595,620	1,014,755,985	0.116871
STTP	2019	124,452,770,582	607,043,293,422	0.205015
	2020	144,978,315,572	773,607,195,121	0.187406
	2021	147,614,953,252	765,188,720,115	0.192913
	2022	132,199,514,819	756,723,520,605	0.174700
	2023	184,846,323,957	1,102,640,346,668	0.167640

Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Saham Institusional	Total Saham Perusahaan	Kepemilikan Institusional
INTP	2019	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014
	2020	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014
	2021	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014
	2022	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014
	2023	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014
ARNA	2019	1,027,150,000	7,341,430,976	0.139911
	2020	1,030,000,000	7,341,430,976	0.140300
	2021	1,037,195,000	7,341,430,976	0.141280
	2022	1,037,660,000	7,341,430,976	0.141343
	2023	1,065,432,500	7,341,430,976	0.145126
SMSM	2019	3,347,263,708	5,758,675,440	0.581256
	2020	3,347,263,708	5,758,675,440	0.581256
	2021	3,347,263,708	5,758,675,440	0.581256
	2022	2,910,392,136	5,758,675,440	0.505393
	2023	2,910,392,136	5,758,675,440	0.505393
CEKA	2019	547,471,000	595,000,000	0.920119
	2020	547,471,000	595,000,000	0.920119
	2021	547,471,000	595,000,000	0.920119
	2022	517,771,000	595,000,000	0.870203
	2023	517,771,000	595,000,000	0.870203
CLEO	2019	9,750,000,000	12,000,000,000	0.812500
	2020	9,764,900,000	12,000,000,000	0.813742
	2021	9,764,900,000	12,000,000,000	0.813742
	2022	9,225,600,000	12,000,000,000	0.768800
	2023	9,225,600,000	12,000,000,000	0.768800
MYOR	2019	13,207,471,425	22,358,699,725	0.590708
	2020	13,207,471,425	22,358,699,725	0.590708
	2021	13,207,471,425	22,358,699,725	0.590708

	2022	13,207,471,425	22,358,699,725	0.590708
	2023	13,207,471,425	22,358,699,725	0.590708
KLBF	2019	26,702,830,685	46,875,122,110	0.569659
	2020	26,751,692,485	46,875,122,110	0.570701
	2021	27,148,327,585	46,875,122,110	0.579163
	2022	27,182,158,658	46,875,122,110	0.579885
	2023	27,185,158,685	46,875,122,110	0.579949
SIDO	2019	12,150,000,000	15,000,000,000	0.810000
	2020	24,300,000,000	30,000,000,000	0.810000
	2021	24,478,282,442	30,000,000,000	0.815943
	2022	23,278,282,442	30,000,000,000	0.775943
	2023	23,278,282,442	30,000,000,000	0.775943
TSPC	2019	3,619,823,418	4,500,000,000	0.804405
	2020	3,674,161,618	4,500,000,000	0.816480
	2021	3,704,766,118	4,509,864,300	0.821481
	2022	3,773,630,518	4,509,864,300	0.836750
	2023	3,887,731,118	4,509,864,300	0.862051
UNVR	2019	648,877,500	7,630,000,000	0.085043
	2020	32,424,387,500	38,150,000,000	0.849918
	2021	32,424,387,500	38,150,000,000	0.849918
	2022	32,424,387,500	38,150,000,000	0.849918
	2023	32,424,387,500	38,150,000,000	0.849918
BUDI	2019	2,602,568,831	4,498,997,362	0.578478
	2020	2,602,568,831	4,498,997,362	0.578478
	2021	2,602,568,831	4,498,997,362	0.578478
	2022	2,602,568,831	4,498,997,362	0.578478
	2023	2,602,568,831	4,498,997,362	0.578478
ASII	2019	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501148
	2020	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501148
	2021	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501148
	2022	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501148
	2023	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501148
CPIN	2019	9,106,385,410	16,398,000,000	0.555335
	2020	9,106,385,410	16,398,000,000	0.555335
	2021	9,106,385,410	16,398,000,000	0.555335
	2022	9,106,385,410	16,398,000,000	0.555335
	2023	10,081,299,610	16,398,000,000	0.614788
ESIP	2019	354,400,000	640,000,000	0.553750

	2020	354,400,000	640,000,005	0.553750
	2021	354,400,000	640,347,707	0.553449
	2022	354,400,000	1,109,937,083	0.319297
	2023	354,400,000	1,109,953,847	0.319293
STTP	2019	743,600,500	1,310,000,000	0.567634
	2020	743,600,500	1,310,000,000	0.567634
	2021	743,600,500	1,310,000,000	0.567634
	2022	743,600,500	1,310,000,000	0.567634
	2023	743,600,500	1,310,000,000	0.567634

Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Total Komisaris	Dewan Komisaris Independen
INTP	2019	2	6	0.333333
	2020	2	6	0.333333
	2021	3	7	0.428571
	2022	3	7	0.428571
	2023	3	7	0.428571
ARNA	2019	2	4	0.500000
	2020	2	4	0.500000
	2021	2	4	0.500000
	2022	2	4	0.500000
	2023	2	4	0.500000
SMSM	2019	1	2	0.500000
	2020	1	2	0.500000
	2021	1	2	0.500000
	2022	1	2	0.500000
	2023	1	2	0.500000
CEKA	2019	2	4	0.500000
	2020	2	4	0.500000
	2021	2	4	0.500000
	2022	2	4	0.500000
	2023	1	3	0.333333
CLEO	2019	1	3	0.333333
	2020	1	3	0.333333
	2021	1	3	0.333333
	2022	1	3	0.333333
	2023	1	3	0.333333

MYOR	2019	2	5	0.400000
	2020	2	5	0.400000
	2021	2	5	0.400000
	2022	2	5	0.400000
	2023	2	5	0.400000
KLBF	2019	3	7	0.428571
	2020	3	7	0.428571
	2021	3	7	0.428571
	2022	2	6	0.333333
	2023	3	7	0.428571
SIDO	2019	2	5	0.400000
	2020	3	6	0.500000
	2021	3	6	0.500000
	2022	3	6	0.500000
	2023	3	6	0.500000
TSPC	2019	2	5	0.400000
	2020	3	5	0.600000
	2021	3	5	0.600000
	2022	3	5	0.600000
	2023	3	5	0.600000
UNVR	2019	4	6	0.666667
	2020	1	6	0.166667
	2021	2	6	0.333333
	2022	2	6	0.333333
	2023	2	6	0.333333
BUDI	2019	2	6	0.333333
	2020	1	3	0.333333
	2021	1	3	0.333333
	2022	1	3	0.333333
	2023	1	3	0.333333
ASII	2019	3	10	0.300000
	2020	3	10	0.300000
	2021	4	10	0.400000
	2022	4	10	0.400000
	2023	4	10	0.400000
CPIN	2019	1	3	0.333333
	2020	1	3	0.333333
	2021	1	3	0.333333

	2022	1	3	0.333333
	2023	2	4	0.500000
ESIP	2019	1	2	0.500000
	2020	1	2	0.500000
	2021	1	2	0.500000
	2022	1	2	0.500000
	2023	1	2	0.500000
STTP	2019	1	2	0.500000
	2020	1	2	0.500000
	2021	1	2	0.500000
	2022	1	2	0.500000
	2023	1	2	0.500000

Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
INTP	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
ARNA	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
SMSM	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
CEKA	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
CLEO	2019	3
	2020	3

	2021	3
	2022	3
	2023	3
MYOR	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
KLBF	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
SIDO	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
TSPC	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
UNVR	2019	3
	2020	3
	2021	4
	2022	3
	2023	3
BUDI	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
ASII	2019	4
	2020	4
	2021	4
	2022	4
	2023	4

CPIN	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
ESIP	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3
STTP	2019	3
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3

Kode Perusahaan	Tahun	Kompensasi	LN	Dalam
INTP	2019	78,465,000,000	25.085919	Jutaan
	2020	81,898,000,000	25.128740	Jutaan
	2021	75,935,000,000	25.053144	Jutaan
	2022	78,785,000,000	25.089988	Jutaan
	2023	108,107,000,000	25.406387	Jutaan
ARNA	2019	1,361,000,000,000	27.939241	miliar
	2020	1,772,000,000,000	28.203130	miliar
	2021	1,814,000,000,000	28.226555	miliar
	2022	1,807,000,000,000	28.222689	miliar
	2023	1,817,000,000,000	28.228208	miliar
SMSM	2019	63,204,000,000	24.869633	Jutaan
	2020	52,747,000,000	24.688773	Jutaan
	2021	77,897,000,000	25.078653	Jutaan
	2022	83,803,000,000	25.151735	Jutaan
	2023	78,804,000,000	25.090230	Jutaan
CEKA	2019	17,374,252,000	23.578255	Jutaan
	2020	15,955,008,160	23.493039	Jutaan
	2021	16,392,087,152	23.520065	Jutaan
	2022	20,267,860,400	23.732302	Jutaan

	2023	19,820,455,100	23.709980	Jutaan
CLEO	2019	131,000,000,000	25.598463	miliar
	2020	1,707,000,000,000	28.165759	miliar
	2021	1,718,000,000,000	28.172182	miliar
	2022	1,929,000,000,000	28.288023	miliar
	2023	2,119,000,000,000	28.381965	miliar
MYOR	2019	398,415,283,295	26.710761	jutaan
	2020	415,574,243,403	26.752927	jutaan
	2021	419,478,106,867	26.762277	jutaan
	2022	434,600,512,570	26.797693	jutaan
	2023	459,087,341,751	26.852506	jutaan
KLBF	2019	4,371,000,000,000	29.106013	miliar
	2020	4,612,000,000,000	29.159683	miliar
	2021	5,346,000,000,000	29.307370	miliar
	2022	4,523,000,000,000	29.140197	miliar
	2023	4,295,000,000,000	29.088473	miliar
SIDO	2019	28,891,991,864	24.086830	Jutaan
	2020	39,730,000,000	24.405372	Jutaan
	2021	31,248,000,000	24.165221	Jutaan
	2022	45,683,000,000	24.544992	Jutaan
	2023	33,589,000,000	24.237464	Jutaan
TSPC	2019	3,660,000,000,000	28.928484	miliar
	2020	2,940,000,000,000	28.709431	miliar
	2021	3,740,000,000,000	28.950107	miliar
	2022	3,830,000,000,000	28.973886	miliar
	2023	4,150,000,000,000	29.054129	miliar
UNVR	2019	94,129,000,000	25.267932	Jutaan
	2020	103,876,000,000	25.366464	Jutaan
	2021	85,012,000,000	25.166058	Jutaan
	2022	87,462,000,000	25.194470	Jutaan
	2023	118,096,000,000	25.494764	Jutaan
BUDI	2019	46,771,000,000	24.568529	Jutaan
	2020	44,967,000,000	24.529195	Jutaan
	2021	46,699,000,000	24.566989	Jutaan
	2022	56,202,000,000	24.752218	Jutaan
	2023	57,546,000,000	24.775850	Jutaan
ASII	2019	1,305,000,000,000	27.897224	miliar
	2020	976,000,000,000	27.606728	miliar

	2021	1,098,000,000,000	27.724511	miliar
	2022	1,379,000,000,000	27.952380	miliar
	2023	1,655,000,000,000	28.134822	miliar
CPIN	2019	118,615,000,000	25.499149	Jutaan
	2020	127,157,000,000	25.568688	Jutaan
	2021	122,145,000,000	25.528475	Jutaan
	2022	110,416,000,000	25.427521	Jutaan
	2023	126,042,000,000	25.559881	Jutaan
ESIP	2019	367,885,000	19.723281	rupiah
	2020	570,030,000	20.161200	rupiah
	2021	529,320,000	20.087104	rupiah
	2022	561,180,000	20.145552	rupiah
	2023	646,254,700	20.286704	rupiah
STTP	2019	6,434,516,700	22.584943	rupiah
	2020	6,952,270,694	22.662334	rupiah
	2021	7,987,762,400	22.801177	rupiah
	2022	6,307,781,704	22.565050	rupiah
	2023	6,721,826,068	22.628626	rupiah

Kode Perusahaan	Tahun	ETR	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kompensasi Eksekutif
INTP	2019	0.193069	0.510014315	0.333333	3	25.0859185
	2020	0.159189	0.510014315	0.333333	3	25.12874041
	2021	0.199421	0.510014315	0.428571	3	25.05314355
	2022	0.195201	0.510014315	0.428571	3	25.08998846
	2023	0.186151	0.510014315	0.428571	3	25.40638731
ARNA	2019	0.254415	0.139911416	0.500000	3	27.93924084
	2020	0.216606	0.140299623	0.500000	3	28.20312997
	2021	0.225370	0.141279677	0.500000	3	28.22655547
	2022	0.219470	0.141343017	0.500000	3	28.22268913
	2023	0.222005	0.145125998	0.500000	3	28.22820791
SMSM	2019	0.223062	0.581255836	0.500000	3	24.86963343
	2020	0.212127	0.581255836	0.500000	3	24.68877274
	2021	0.210271	0.581255836	0.500000	3	25.07865328
	2022	0.201414	0.505392632	0.500000	3	25.15173464
	2023	0.181605	0.505392632	0.500000	3	25.09022959
CEKA	2019	0.231872	0.920119328	0.500000	3	23.57825518

	2020	0.193750	0.920119328	0.500000	3	23.49303861
	2021	0.203142	0.920119328	0.500000	3	23.52006456
	2022	0.210910	0.870203361	0.500000	3	23.73230224
	2023	0.206800	0.870203361	0.333333	3	23.70998033
CLEO	2019	0.198226	0.8125	0.333333	3	25.59846316
	2020	0.170886	0.813741667	0.333333	3	28.16575856
	2021	0.181805	0.813741667	0.333333	3	28.17218194
	2022	0.191164	0.7688	0.333333	3	28.28802285
	2023	0.192828	0.7688	0.333333	3	28.3819654
MYOR	2019	0.248961	0.590708386	0.400000	3	26.71076072
	2020	0.214770	0.590708386	0.400000	3	26.75292712
	2021	0.191252	0.590708386	0.400000	3	26.76227717
	2022	0.208089	0.590708386	0.400000	3	26.79769308
	2023	0.213247	0.590708386	0.400000	3	26.85250632
KLBF	2019	0.254221	0.569658904	0.428571	3	29.10601293
	2020	0.228251	0.570701286	0.428571	3	29.15968272
	2021	0.219937	0.579162813	0.428571	3	29.30736973
	2022	0.226247	0.579884541	0.333333	3	29.14019661
	2023	0.229556	0.579948541	0.428571	3	29.08847267
SIDO	2019	0.247846	0.81	0.400000	3	24.0868303
	2020	0.221360	0.81	0.500000	3	24.40537241
	2021	0.218402	0.815942748	0.500000	3	24.16522121
	2022	0.221951	0.775942748	0.500000	3	24.54499207
	2023	0.220486	0.775942748	0.500000	3	24.23746447
TSPC	2019	0.252525	0.804405204	0.400000	3	28.92848426
	2020	0.216148	0.81648036	0.600000	3	28.7094307
	2021	0.200800	0.821480619	0.600000	3	28.95010673
	2022	0.219800	0.836750347	0.600000	3	28.97388592
	2023	0.220136	0.862050576	0.600000	3	29.05412945
UNVR	2019	0.253382	0.085042923	0.666667	3	25.26793202
	2020	0.221936	0.849918414	0.166667	3	25.36646372
	2021	0.231898	0.849918414	0.333333	4	25.16605826
	2022	0.232926	0.849918414	0.333333	3	25.19447025
	2023	0.225889	0.849918414	0.333333	3	25.49476369
BUDI	2019	0.097789	0.578477519	0.333333	3	24.56852919
	2020	0.052430	0.578477519	0.333333	3	24.52919472
	2021	0.155039	0.578477519	0.333333	3	24.56698859
	2022	0.178263	0.578477519	0.333333	3	24.75221818

	2023	0.215849	0.578477519	0.333333	3	24.77585046
ASII	2019	0.218271	0.501148083	0.300000	4	27.89722416
	2020	0.145807	0.501148083	0.300000	4	27.60672842
	2021	0.209088	0.501148083	0.400000	4	27.72451146
	2022	0.197857	0.501148083	0.400000	4	27.95237971
	2023	0.186884	0.501148083	0.400000	4	28.13482212
CPIN	2019	0.209696	0.555335127	0.333333	3	25.49914879
	2020	0.193356	0.555335127	0.333333	3	25.56868838
	2021	0.218955	0.555335127	0.333333	3	25.5284747
	2022	0.171556	0.555335127	0.333333	3	25.42752089
	2023	0.226501	0.614788365	0.500000	3	25.55988102
ESIP	2019	0.125163	0.55375	0.500000	3	19.72328095
	2020	0.110101	0.553749996	0.500000	3	20.16119955
	2021	0.240145	0.553449315	0.500000	3	20.08710372
	2022	0.100549	0.319297378	0.500000	3	20.14555227
	2023	0.116871	0.319292555	0.500000	3	20.28670426
STTP	2019	0.205015	0.567633969	0.500000	3	22.58494257
	2020	0.187406	0.567633969	0.500000	3	22.66233416
	2021	0.192913	0.567633969	0.500000	3	22.80117651
	2022	0.174700	0.567633969	0.500000	3	22.5650499
	2023	0.167640	0.567633969	0.500000	3	22.62862569

Lampiran 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Date: 02/24/25
Time: 14:14
Sample: 2019 2023

	Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kompensasi Eksekutif
Mean	0.200248	0.604127	0.431111	3.080000	25.65420
Median	0.209696	0.578478	0.428571	3.000000	25.36646
Maximum	0.254415	0.920119	0.666667	4.000000	29.30737
Minimum	0.052430	0.085043	0.166667	3.000000	19.72328
Std. Dev.	0.038096	0.200071	0.091682	0.273120	2.453458
Skewness	-1.537219	-0.630109	-0.019639	3.096281	-0.429763
Kurtosis	5.895499	3.403480	2.790737	10.58696	2.734374
Jarque-Bera	55.73777	5.471702	0.141668	299.7179	2.529198
Probability	0.000000	0.064839	0.931616	0.000000	0.282352

Sum	15.01862	45.30951	32.33333	231.0000	1924.065
Sum Sq. Dev.	0.107395	2.962114	0.622011	5.520000	445.4399
Observations	75	75	75	75	75

Lampiran 3 Hasil Uji Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/25 Time: 14:21

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037761	0.067889	-0.556221	0.5798
Kepemilikan Institusional	0.032136	0.019927	1.612692	0.1113
Dewan Komisaris Independen	0.102578	0.044974	2.280856	0.0256
Komite Audit	-0.006652	0.015026	-0.442668	0.6594
Kompensasi Eksekutif	0.007596	0.001633	4.651908	0.0000
R-squared	0.270407	Mean dependent var		0.200248
Adjusted R-squared	0.228716	S.D. dependent var		0.038096
S.E. of regression	0.033457	Akaike info criterion		-3.892786
Sum squared resid	0.078355	Schwarz criterion		-3.738287
Log likelihood	150.9795	Hannan-Quinn criter.		-3.831096
F-statistic	6.485976	Durbin-Watson stat		1.252570
Prob(F-statistic)	0.000169			

Lampiran 4 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/25 Time: 14:22

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232667	0.304827	0.763273	0.4485
Kepemilikan Institusional	0.024346	0.047912	0.508126	0.6134
Dewan Komisaris Independen	0.056353	0.069725	0.808212	0.4224

Komite Audit	-0.004316	0.032609	-0.132365	0.8952
Kompensasi Eksekutif	-0.002266	0.010901	-0.207844	0.8361

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.582828	Mean dependent var	0.200248
Adjusted R-squared	0.448737	S.D. dependent var	0.038096
S.E. of regression	0.028285	Akaike info criterion	-4.078440
Sum squared resid	0.044802	Schwarz criterion	-3.491343
Log likelihood	171.9415	Hannan-Quinn criter.	-3.844019
F-statistic	4.346504	Durbin-Watson stat	2.165689
Prob(F-statistic)	0.000012		

Lampiran 5 Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/24/25 Time: 14:23

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014753	0.097490	-0.151328	0.8802
Kepemilikan Institusional	0.032125	0.028258	1.136870	0.2595
Dewan Komisaris Independen	0.079563	0.052747	1.508390	0.1360
Komite Audit	-0.006198	0.020667	-0.299892	0.7651
Kompensasi Eksekutif	0.007031	0.002678	2.625903	0.0106

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.021972	0.3763
Idiosyncratic random	0.028285	0.6237

Weighted Statistics

R-squared	0.115912	Mean dependent var	0.099909
Adjusted R-squared	0.065393	S.D. dependent var	0.028666
S.E. of regression	0.027713	Sum squared resid	0.053762
F-statistic	2.294416	Durbin-Watson stat	1.824509
Prob(F-statistic)	0.067799		

Unweighted Statistics

R-squared	0.266572	Mean dependent var	0.200248
Sum squared resid	0.078767	Durbin-Watson stat	1.245316

Lampiran 6 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.995602	(14,56)	0.0018
Cross-section Chi-square	41.924051	14	0.0001

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/25 Time: 14:25

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037761	0.067889	-0.556221	0.5798
Kepemilikan Institusional	0.032136	0.019927	1.612692	0.1113
Dewan Komisaris Independen	0.102578	0.044974	2.280856	0.0256
Komite Audit	-0.006652	0.015026	-0.442668	0.6594
Kompensasi Eksekutif	0.007596	0.001633	4.651908	0.0000
R-squared	0.270407	Mean dependent var		0.200248
Adjusted R-squared	0.228716	S.D. dependent var		0.038096
S.E. of regression	0.033457	Akaike info criterion		-3.892786
Sum squared resid	0.078355	Schwarz criterion		-3.738287
Log likelihood	150.9795	Hannan-Quinn criter.		-3.831096
F-statistic	6.485976	Durbin-Watson stat		1.252570
Prob(F-statistic)	0.000169			

Lampiran 7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.199040	4	0.8783

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
Kepemilikan Institusional	0.024346	0.032125	0.001497	0.8406
Dewan Komisaris Independen	0.056353	0.079563	0.002079	0.6107
Komite Audit	-0.004316	-0.006198	0.000636	0.9405
Kompensasi Eksekutif	-0.002266	0.007031	0.000112	0.3790

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/25 Time: 14:26

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232667	0.304827	0.763273	0.4485
Kepemilikan Institusional	0.024346	0.047912	0.508126	0.6134
Dewan Komisaris Independen	0.056353	0.069725	0.808212	0.4224
Komite Audit	-0.004316	0.032609	-0.132365	0.8952
Kompensasi Eksekutif	-0.002266	0.010901	-0.207844	0.8361

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.582828	Mean dependent var	0.200248
Adjusted R-squared	0.448737	S.D. dependent var	0.038096
S.E. of regression	0.028285	Akaike info criterion	-4.078440
Sum squared resid	0.044802	Schwarz criterion	-3.491343
Log likelihood	171.9415	Hannan-Quinn criter.	-3.844019
F-statistic	4.346504	Durbin-Watson stat	2.165689
Prob(F-statistic)	0.000012		

Lampiran 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

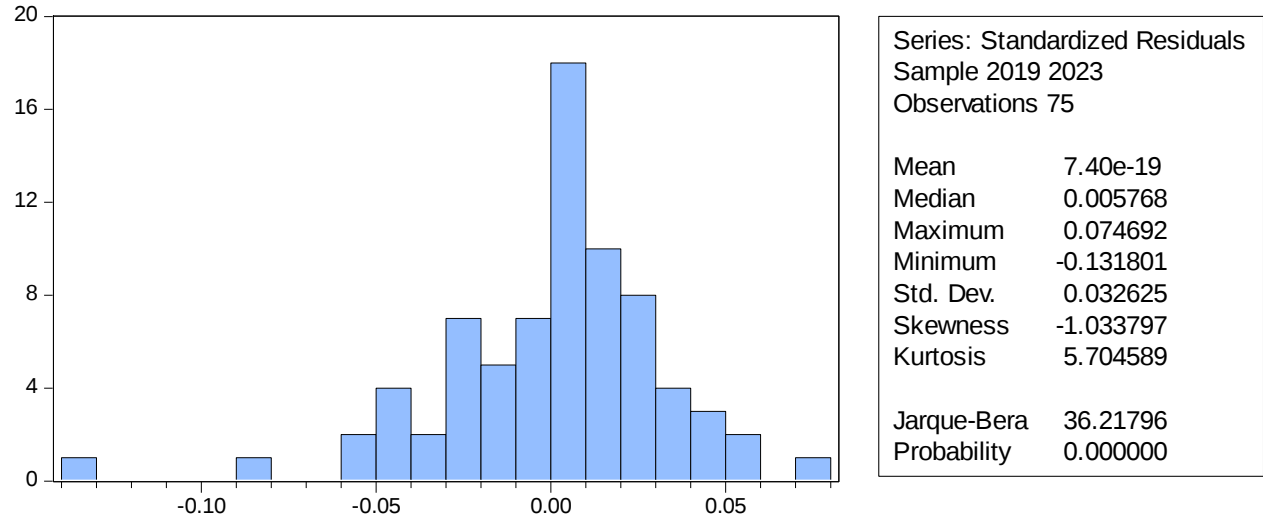
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	10.77618 (0.0010)	1.351837 (0.2450)	12.12802 (0.0005)
Honda	3.282709 (0.0005)	1.162685 (0.1225)	3.143369 (0.0008)
King-Wu	3.282709 (0.0005)	1.162685 (0.1225)	2.572876 (0.0050)
Standardized Honda	4.466639 (0.0000)	1.498871 (0.0670)	0.573352 (0.2832)
Standardized King-Wu	4.466639 (0.0000)	1.498871 (0.0670)	0.268450 (0.3942)
Gourierioux, et al.*	--	--	12.12802 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas



Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas

	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kompensasi Eksekutif
Kepemilikan Institusional	1.000000	-0.182067	-0.066550	-0.037786
Dewan Komisaris Independen	-0.182067	1.000000	-0.244652	-0.149374
Komite Audit	-0.066550	-0.244652	1.000000	0.212891
Kompensasi Eksekutif	-0.037786	-0.149374	0.212891	1.000000

Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/24/25 Time: 14:52

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.087052	0.062309	1.397103	0.1668
Kepemilikan Institusional	-0.011509	0.018111	-0.635463	0.5272
Dewan Komisaris Independen	-0.022701	0.034157	-0.664614	0.5085
Komite Audit	0.001960	0.013274	0.147670	0.8830
Kompensasi Eksekutif	-0.002037	0.001697	-1.200085	0.2342

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.013710	0.3531
Idiosyncratic random		0.018556	0.6469

Weighted Statistics			
R-squared	0.027436	Mean dependent var	0.012477
Adjusted R-squared	-0.028139	S.D. dependent var	0.017942
S.E. of regression	0.018192	Sum squared resid	0.023168
F-statistic	0.493682	Durbin-Watson stat	1.566284
Prob(F-statistic)	0.740367		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.063519	Mean dependent var	0.024097
Sum squared resid	0.032981	Durbin-Watson stat	1.100246

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Winne Cahya Sembodo
Tempat, Tanggal Lahir	: Batam, 29 Juli 2002
Nomor Induk Mahasiswa	: 2105046060
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kavling Sagulung Baru Blok j no 145, Kota Batam
E-mail	: winnecahyas8@gmail.com
No.Hp	: 0857-6620-4704

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 011 SAGULUNG (2009-2015)
2. SMPN 9 BATAM (2015-2018)
3. SMAN 19 BATAM (2018-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah
2. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam